



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2023



Alamat Jl. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695 Fax. (0741) 62751

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xii
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	7
1.4. Entitas.....	9
1.5. Kebijakan Konversi.....	9
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1. Kebijakan Keuangan	13
2.2. Pencapaian Target Kinerja	14
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	24
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	29
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	29
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	28
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	32
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	47
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	47
5.3. Neraca	80
5.4. Laporan Operasional	121
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	140
BAB VI PENUTUP.....	142
LAMPIRAN	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62751, Fax (0741) 62751, Website : www.sosdukcapil.jambiprov.go.id

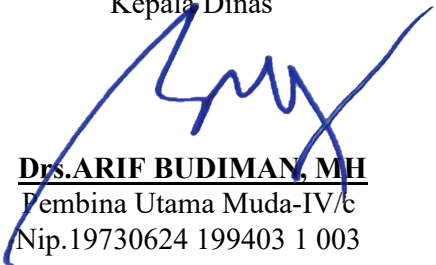
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang terdiri dari

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Neraca ;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Arus Kas;
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan
- (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Keuangan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2023
Kepala Dinas


Drs. ARIF BUDIMAN, MH
Pembina Utama Muda-IV/c
Nip.19730624 199403 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalah pahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan.

Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi TA 2023 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2023. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi

mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
16. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.

3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2021.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan, Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4. Entitas

Untuk TA 2023, entitas dalam Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2023 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi TA 2021 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversidan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2023.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2023 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2021, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalan sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018

tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan Sosial.

Adapun strategi pembangunan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan dan PMKS Lainnya
- 2) Meningkatkan mutu, jenis dan standar pelayanan melalui penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 4) Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Tuna Sosial dan penyandang eks. penyakit sosial dan PMKS lainnya.
- 5) Meningkatkan Penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat.
- 6) Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendamping bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar.

- 7) Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
- 8) Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mendorong peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktifitas dan taraf hidup PMKS
2. Mewujudkan Pelayanan Sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf Kesejahteraan Sosial.
3. Mendorong sinergitas dan peran serta Masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacupada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

1. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2023 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 39.729.041.670.00,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 38.026.035.577.00,- atau 95.71 % dari realisasi tahun lalu sebesar Rp. 50.023.592.610.00,-

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.954.100.00	99.533.450.00	50.61
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.954.100.00	99.533.450.00	90.52
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.400.000.00	48.400.000.00	100
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48.400.000.00	48.400.000.00	100
III.	Administrasi Umum Perangkat daerah	1.194.286.808.00	1.054.232.290.00	88.27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.288.818.00	37.690.208.00	98.44
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	642.360.066.00	611.526.300.00	95.20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.659.000.00	54.351.252.00	99.44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.883.400.00	40.146.100.00	87.50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.095.524.00	310.518.430.00	75.17
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
	Pengadaan Mebel	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565.600.645.00	527.553.280.00	93.27
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	365.606.480.00	335.493.980.00	91.76
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	199.994.165.00	192.059.300.00	96.03
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.043.934.061.00	1.783.394.112.00	87.25
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	571.485.800.00	326.803.400.00	57.18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	1.411.838.261.00	1.396.224.712.00	98.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	60.610.000.00	60.366.000.00	99.60

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi	41.433.681.00	36.201.725.00	87.37
1.	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau Barang	41.433.681.00	36.201.725.00	87.37
II	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.431.514.669.00	1.355.344.684.00	94.68
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	49.998.316.00	42.461.704.00	84.93
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	45.199.150.00	41.449.150.00	91.70
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	913.644.666.00	897.735.916.00	98.26
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	642.360.066.00	373.697.914.00	88.41
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	146.302.190.00	145.979.456.00	99.78
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	71.307.532.00	71.046.400.00	99.63
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	74.994.658.00	74.933.056.00	99.92

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.688.108.058.00	1.217.985.189.00	72.15
1.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.688.108.058.00	1.217.985.189.00	72.15

4. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	168.986.055.00	136.504.085.00	80.78
1.	Penyediaan Permakanan	5.298.200.00	3.184.200.00	60.10
II	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.975.920.00	35.920.620.00	92.16
1.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	55.199.935.00	52.599.765.00	95.29
III.	Pelayanan Dukungan Sosial	69.512.000.00	44.799.500.00	64.45

	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	129.720.000.00	109.812.000.00	84.65
	Fasilitasi Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/Kota	129.720.000.00	109.812.000.00	84.65

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	110.848.378.00	67.222.878.00	60.64
1.	Pengangkatan Anak antar WNI	110.848.378.00	67.222.878.00	60.64
II				

6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	491.683.200.00	353.407.767.00	71.88
1.	Penetapan Kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan nasional	199.868.590.00	151.104.000.00	75.60
II	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi Kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	94.889.120.00	88.114.163.00	92.86
1.	Penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi	149.994.310.00	92.680.021.00	61.79
III.	Pemanfaatan data peristiwa Kependudukan	46.931.180.00	21.509.583.00	45.83
	Pelayanan Pencatatan Sipil	425.292.581.00	266.286.685.00	62.61
	Pemanfaatan data Peristiwa penting	53.126.000.00	12.429.108.00	23.40
	Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota	165.244.421.00	123.895.125.00	74.98
	Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	93.654.820.00	69.481.593.00	74.19
	Penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	79.244.820.00	60.901.784.00	76.85
IV.	Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan data agregat dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota	14.410.000.00	8.579.809.00	59.54
	Pengadaan Mebel	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
V	Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	244.812.400.00	222.718.962.00	90.98
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	78.124.800.00	70.856.056.00	90.70
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	72.340.000.00	72.340.000.00	100
VI.	Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	12.565.000.00	4.440.000.00	35.34
	Koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi	660.000.00	660.000.00	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan	65.792.100.00	59.952.906.00	91.12

	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	0.00	0.00	0.00
	Pemberian Konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	15.330.500.00	14.470.000.00	94.39
	Pembinaan dan pengawasan pengolahan administrasi informasi kependudukan provinsi	488.246.269.00	320.737.631.00	65.69
	Pembinaan dan pengawasan terkait pengolahan administrasi kependudukan	469.983.269.00	309.592.334.00	65.87
	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan	18.263.000.00	11.145.297.00	61.03
	Penyediaan Profil kependudukan	3.970.000.00	3.445.000.00	86.75
	Penyediaan data kependudukan provinsi	3.445.000.00	3.445.000.00	100
	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	525.000.00	0.00	0.00

7. UPTD PSTW BUDI LUHUR JAMBI

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	1.477.689.512.00	1.289.392.373.00	91,26
1.	Penyediaan Permakanan	709.560.000.00	601.120.031.00	84,72
2.	Penyediaan Sandang	137.471.944.00	130.042.264.00	98,72
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	493.696.041.00	427.385.483.00	97,53
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	9.219.958.00	9.219.848.00	100
5.	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan sosial	15.744.552.00	15.744.552.00	100
6.	Pemberian Bimbingan Aktifitas hidup sehari hari	64.780.552.00	63.837.060.00	98,54
7.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan bagi penyandang disabilitas	3.450.000.00	3.450.000.00	100
8.	Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	26.292.400.00	22.292.400.00	86,25
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	17.474.065.00	15.917.097.00	91,09

8. UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA JAMBI

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.246.443.733.00	2.187.028.524.00	97.36
1.	Penyediaan Permakanan	1.250.739.000.00	1.214.522.355.00	97,10
2.	Penyediaan Sandang	129.856.495.00	129.091.500.00	99,41
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	388.800.000.00	388.800.000.00	100
4.	Penyediaan Alat Bantu	127.539.682.00	127.166.882.00	99,71
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantil	28.342.700.00	28.342.700.00	100
6.	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	77.993.060.00	75.108.060.00	96,30
7.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	167.696.263.00	166.318.788.00	99,18

8.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.447.533.00	23.299.739.00	76,52
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	45.029.000.00	34.378.500.00	76,35

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
II	Rehabilitasi Sosial dasar Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	697.966.217.00	613.935.545.00	87,96
1.	Pengasuhan	2.897.156.00	2.665.826.00	91,67
2.	Penyediaan Permakanan	208.995.783.00	181.664.931.00	86,92
3.	Penyediaan Sandang	57.020.754.00	56.973.754.00	99,92
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	226.009.465.00	212.703.738.00	94,11
6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.059.496.00	3.045.713.00	99,55
7.	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	42.119.279.00	34.363.779.00	81,59
8.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	105.765.084.00	75.414.604.00	71,30
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	25.033.200.00	25.033.200.00	100
10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.066.000.00	22.080.000.00	81,58
III.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	48.600.000.00	48.600.000.00	100
	Penyediaan Permakanan	0	0	0
	Penyediaan Sandang	48.600.000.00	48.600.000.00	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0	0	0
	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	0	0	0
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	0	0	0
	Pemulangan ke Daerah Asal	0	0	0
IV.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	238.319.227.00	215.663.007.00	90,49
	Penyediaan Permakanan	59.652.000.00	47.783.200.00	80,10
	Penyediaan Sandang	16.832.199.00	16.832.199.00	100
	Penyediaan asrama yang mudah diakses	70.800.000.00	68.800.000.00	97,18
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.999.763.00	3.999.763.00	100
	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	32.076.660.00	31.541.660.00	98,33
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	20.465.385.00	15.666.965.00	76,55
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10.769.220.00	10.769.220.00	100
	Fasilitas Pembuatan nomor induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk akta kelahiran surat nikah dan/atau identitas anak	1.032.000.00	900.000.00	87,21
	pemulangan ke Daerah Asal	22.692.000.00	19.370.000.00	85,36

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jambi telah menganut anggaran defisit.

APBD Provinsi Jambi TA 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, maka anggaran Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp.40.000.000,00 anggaran belanja sebesar Rp. 39.729.041.670,- Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	40.000.000,00	38.140.000.00	95.35
2	Belanja	39.729.041.670.00	38.026.035.577.00	95.71
	Surplus/ (Defisit)	(39.689.041.670)	(37.987.895.577)	95,71

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 40.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.38.140.000.00,-atau 95.35% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp.39.729.041.670.00,- direalisasikan sebesar Rp.38.026.035.577.00,- atau 95.71% dari anggarannya.Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar (Rp.39.689.041.670.00),- defisit sebesar (Rp.37.987.895.577.00),- atau 95.71%
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2023 s.d. 2017

(dalam rupiah)

No .	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	5	6
1.	2017	29.700.000	15.030.000	50.61
2.	2018	32.000.000.00	27.500.000.00	85.94
3.	2019	33.000.000.00	18.490.000.00	56.03
4.	2020	23.500.000	29.170.000.00	124.13
5.	2021	35.000.000.00	46.170.000.00	131.91
6.	2022		20.520.000.00	
7.	2023	40.000.000.00	38.180.000.00	95.35

Secara keseluruhan dari TA 2023 sampai dengan TA 2022 target PAD Provinsi Jambi pada Dinas Sosdukcipil Provinsi Jambi mengalami Penurunan anggaran dari tahun lalu.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2023 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 39.729.041.670.00,- direalisasikan sebesar Rp. 38.026.035.577.00,- atau 95.71%. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal
4. Belanja Operasi TA 2023 dengan target sebesar Rp. 38.570.582.848.00,- terealisasi sebesar Rp.36.910.165.782.00,- atau 95.70% terdiri dari Belanja

5. Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi

Belanja Operasi TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	17.370.400.847,00	16.895.356.573,00	97,27
2.	Belanja Barang dan Jasa	20.054.682.001,00	18.869.309.209,00	86,05
3.	Belanja Hibah	1.145.500.000,00	1.145.500.000,00	100
4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	47,10
J u m l a h		38.570.582.848,00	36.910.165.782,00	95,70

6. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.850.879.498.00,- dan terealisasi sebesar Rp.780.580.408.00,- atau 91.74% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	717.058.822,00	678.182.829,00	94,58
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	440.000.000,00	436.286.966,00	99,16
3.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.158.458.822	1.115.869.795,00	96,32

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan SKPD selaku entitas Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKPD). Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi merupakan gabungan dari Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelapor yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum

belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) Surplus/Defisit-LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang

meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

- (1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur

dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);

- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar

- (3) Kualitas piutang diragukan
- (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit. Investasi meliputi

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;

- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantian pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2023 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Modal dengan anggarannya dalam TA 2023.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2023, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2023
Rp. 38.140.000,00,-

31 Desember 2022
Rp. 20.520.000,00,-

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. **38.140.000,00,-** atau sebesar 95,35 % dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Retribusi Daerah	40.000.000,-	38.140.000,-	95,35	20.520.000,-
	Jumlah	40.000.000,-	38.140.000,-	95,35	20.520.000,-

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 93.35% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023



4.1.2.1 Retribusi Daerah

31 Desember 2023

Rp. 40.000.000,00,-

31 Desember 2022

Rp. 38.140.000,-

Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. **38.140.000,00,-** atau sebesar 95,35 % atau Naik sebesar Rp 17.620.000,- atau sebesar 85.87% bila dibandingkan realisasi Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp. 20.520.000,- Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 93.35%.

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 4.3 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Periode 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,-	27.900.000,-	93,00	15.400.000,-
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,-	10.240.000,-	102,40	5.120.000,-
Jumlah		40.000.000,-	38.140.000,-	95,35	20.520.000,-

4.1.2.2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

31 Desember 2023

Rp. 27.900.000,-

31 Desember 2022

Rp. 15.400.000,-

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan pendapatan sewa Gedung Pertemuan/Aula bertempat di UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya" Jambi alamat Jl.Kapt Pattimura Jambi. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.900.000,- atau sebesar 93.00%, Naik sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 81.17% dari realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp. 15.400.000,-. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023, Adapaun terjadinya Kenaikan PAD sebagai berikut.

1. Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung tempat pertemuan/Aula yang sudah memadai dan telah dilakukan pemeliharaan rehab bangunan gedung tempat pertemuan/Aula tahun 2023
2. Akan dianggarkan kembali untuk sarana dan prasarana pada gedung tempat pertemuan/Aula sehingga dapat menambah PAD tahun 2024.

Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan

Periode 2023 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	30.000.000,-	27.900.000,-	93,00	15.400.000,-
Jumlah		30.000.000,-	27.900.000,-	93,00	15.400.000,-

4.1.2.3 Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga

31 Desember 2023

Rp. 27.900.000,-

31 Desember 2022

Rp. 15.400.000,-

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan pendapatan sewa Gedung Pertemuan/Aula bertempat di UPTD PSBAWEP "Harapan Mulya" Jambi alamat Jl.Kapt Pattimura Jambi. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.240.000,- atau sebesar 102,40%, Naik sebesar Rp. 5.120.000,- atau sebesar 100 % dari realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp. 5.120.000,- . Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2023, Adapaun terjadinya Kenaikan PAD sebagai berikut.

3. Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung tempat Olahraga/SportHall yang sudah memadai dan telah dilakukan pemeliharaan rehab Gedung tempat Olahraga/SportHall tahun 2023
4. Akan dianggarkan kembali untuk sarana dan prasarana pada Gedung tempat Olahraga/SportHall sehingga dapat menambah PAD tahun 2024.

Tabel 4.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Periode 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

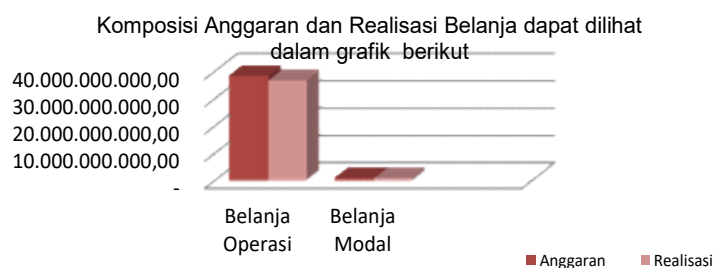
No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,-	10.240.000,-	102,40	5.120.000,-
Jumlah		10.000.000,-	10.240.000,-	102,40	5.120.000,-

5 Belanja Daerah

31 Desember 2023
Rp. 38.026.035.577,00

31 Desember 2022
Rp. 40.320.261.262,84

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 39.729.041.670,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.026.035.577,- atau sebesar 95,71%, turun sebesar Rp. 2.294.225.685,84,- atau sebesar 5,69% dari realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp. 40.320.261.262,84. Rincian Belanja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Operasi	38.570.582.848	36.910.165.782	95,70	38.519.669.214,84
2.	Belanja Modal	1.158.458.822	1.115.869.795	96,32	1.800.592.048,00
	Jumlah	39.729.041.670	38.026.035.577	95,71	40.320.261.262,84

5.2 Belanja Operasi

31 Desember 2023
Rp. 36.910.165.782,-

31 Desember 2022
Rp. 38.519.669.214,84,-

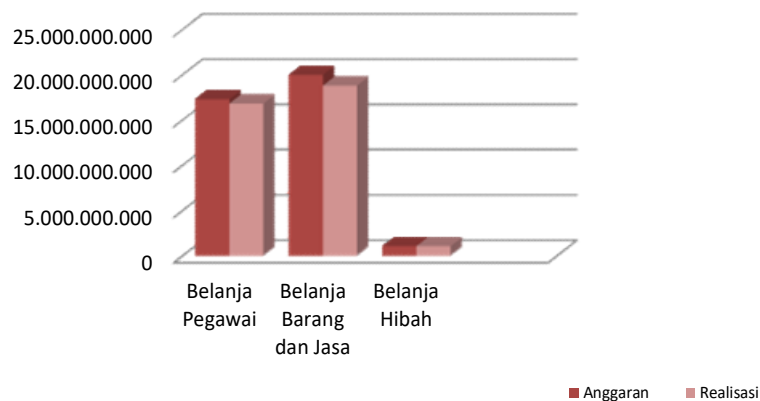
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 38.570.582.848 dengan realisasi sebesar Rp. **36.910.165.782** atau sebesar 95,70%, turun sebesar Rp. 1.609.503.432,84 atau sebesar 4,18% dari realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp. **38.519.669.214,84,00**. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Pegawai	17.370.400.847	16.895.356.573,00	97,27	17.367.470.575,00
2.	Belanja Barang	20.054.682.001	18.869.309.209,00	94,09	20.899.864.639,84
3.	Belanja Hibah	1.145.500.000	1.145.500.000,00	100,00	0
4.	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	252.334.000.00
	Jumlah	38.570.582.848	36.910.165.782,00	95,70	40.320.261.262,84

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat
dalam grafik berikut



5.2.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2023

Rp. 16.895.356.573,00

31 Desember 2022

Rp. 17.367.470.575,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 17.370.400.847,- dengan realisasi sebesar Rp. **16.895.356.573,00** atau sebesar 97,27%, turun sebesar Rp. 472.114.002,- atau sebesar 2,72% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. **17.367.470.575,00,-** Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Rincian Obyek
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	6.903.603.000	6.731.979.200,00	97,51	6.849.374.200,00
2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	601.149.416	575.692.798,00	95,77	598.093.666,00
3.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	186.130.000.00	177.145.000,00	95,17	193.940.000,00
4.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	183.400.000.00	179.680.000,00	97,97	183.625.000,00
5.	Belanja Tunjangan Beras PNS	185.805.750,00	336.173.640,00	95,83	351.092.160,00
6.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.188.502.00	13.742.216,00	90,48	11.936.605,00
7.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110.628.00	86.707,00	78,38	87.634,00
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	663.069.021.00	527.413.847,00	79,54	531.402.807,00
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.235.900.00	13.798.820,00	96,93	13.998.649,00
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	42.723.600.00	41.396.711,00	96,89	41.996.278,00
11.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.520.859.863.00	4.447.465.646,00	98,38	3.847.070.737,00
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	22.668.919.00	22.646.249,00	99,90	22.668.920,00
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.039.619.518.00	3.022.705.739,00	99,44	3.425.253.919,00
14.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	462.540.000.00	446.130.000,00	96,45	931.080.000,00
15.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000.00	3.400.000,00	83,33	8.160.000,00
	Jumlah	17.370.400.847,00	16.895.356.573,00	97,27	17.367.470.575,00

Belanja Pegawai meliputi :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp. 9.320.632.547,- dengan realisasi Sebesar Rp. 8.953.008.939,00 atau sebesar 96,06% dari anggarannya.adapun Jumlah ASN Pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebanyak 119 ASN.

**Tabel 5.4 Jumlah ASN
TA 2023**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Alamat
1.	Pegawai Dinas	84 ASN	Jl.A.Thalib No.45 Telanaipura Jambi
2.	Pegawai UPTD PSBAWEP	25 ASN	Jl.Pattimura Telanaipura Jambi
3	Pegawai UPTD PSTW	10 ASN	Jl.Pangeran Hidayat No.75 Paal V Kec Kotabaru Jambi
	JUMLAH	119 ASN	

1. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 25 Orang ASN

**Tabel 5.5 Jumlah Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
TA 2023**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Honorarium PA	1 Orang
2.	Honorarium KPA	3 Orang
3	Honorarium PPK	1 Orang
4	Honorarium PPTK	11 Orang
5	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1 Orang
6	Honorarium Bendahara	1 Orang
7	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	4 Orang
8	Honorarium Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji	1 Orang
9	Honorarium bendahara Penerimaan	1 Orang
10	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang

**5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 18.869.309.209 Rp. 20.899.864.639,84**

Belanja Barang dan jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 20.054.682.001,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.869.309.209,- atau sebesar 94,09% dari anggarannya, turun sebesar Rp. 2.030.555.430,00 atau sebesar 9.72% dari realisasi Belanja Barang dan jasa TA 2022 sebesar Rp. 20.899.864.639,84 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Barang	7.644.283.406	6.930.735.511,00	90,67	4.891.789.336,00
2.	Belanja Jasa	6.161.045.251	5.789.433.840,00	93,97	5.554.802.021,00
3	Belanja Pemeliharaan	154.436.620	153.841.500,00	99,61	4.824.277.528,84
4	Belanja Perjalanan Dinas	4.157.786.724	4.085.485.577,00	98,26	4.596.995.754,00
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.500.000	86.400.000,00	99,88	4.042.937.654,84
6	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.937.130.000	1.909.812.781,00	98,59	1.032.000.000,00
	Jumlah	20.054.682.001	18.869.309.209	94,09	20.899.864.639,84

5.2.3 Belanja Barang

31 Desember 2023
Rp. 6.930.735.511

31 Desember 2022
Rp. 4.891.789.336

Belanja Barang TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 7.644.283.406,- dengan realisasi sebesar Rp. **6.930.735.511,-** atau sebesar 90,67% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 2.038.946.175,00 atau sebesar 41,68% dari realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp. **4.891.789.336,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Barang Pakai Habis	7.643.829.656	6.930.285.511,00	90,67	4.891.789.336,00
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	453.750	450.000,00	99,33	0
	Jumlah	7.644.283.406	6.930.735.511	90,67	4.891.789.336,00

Untuk Belanja Barang tahun 2023 pada Belanja Barang Pakai Habis terdapat belanja barang pembelian diatas nilai kapitalisasi dan direklas ke BM Peralatan dan Mesin yaitu :

1. pembelian Printer sebanyak 2 Unit dengan Nilai satuan sebesar Rp. 2.135.122,50 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 4.270.245,- merupakan Pembelian Barang pada UPTD PSTW Budi Luhur Jambi beralamat di Jl.P.Hidayat Paal V Kotabaru Jambi dan reklas BI Komputer pada alat Peralatan Personal Computer
2. Belanja Pembelian Etalase sebesar Rp. 1.681.000,- sebanyak 1 Unit dan Pembelian Barang tersebut pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Pattimura Telanaipura Jambi dan reklas ke BI Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor pada alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor.
3. Belanja Listik pengadaan Instalasi jaringan Listrik dan Penambahan daya sebesar Rp. 73.487.000 pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Pattimura Telanaipura Jambi dan Reklas ke BI Jalan,Irigasi dan Jaringan pada jaringan Listrik.

5.2.4 Belanja Jasa

31 Desember 2023
Rp. 5.789.433.840

31 Desember 2022
Rp. 5.554.802.021

Belanja Barang TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 6.161.045.251,- dengan realisasi sebesar Rp. **5.789.433.840,-** atau sebesar 93,97% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 234.631.819,00 atau sebesar 4,22% dari realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp. **5.554.802.021,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Jasa Kantor	5.858.332.633,00	5.526.700.827,00	94,34	4.822.767.996,00
2.	Belanja Jaminan/Asuransi	18.110.400,00	17.139.395,00	94,64	15.172.425,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	153.514.618,00	149.014.618,00	97,07	140.250.000,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	45.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	73.587.600,00	73.079.000,00	99,31	24.712.000,00

6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000.00	11.000.000,00	24,44	39.727.600,00
	Jumlah	6.161.045.251.00	5.789.433.840.00	90,67	5.554.802.021.00

Belanja Jasa Kantor meliputi:

1. Belanja jasa honorarium pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan rakor pada masing masing Kegiatan.Belanja jasa honorarium PTT pada dinas sosial Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Jambi sebanyak 99 orang meliputi PTT pada Dinas sebanyak 26 Orang,PTT pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi sebanyak 50 Orang dan PTT UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 23 Orang.
2. Belanja jasa Tagihan air, listrik,telepon dan internet masing masing pada dinas,UPTD PSBAWEP Harapan mulya Jambi berlamat di Jl.Pattimura Telanaipura dan di Talang Bakung, UPTD PSTW berlamat di Jl Pangeran Hidayat Paal V Kotabaru jambi serta Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti di Thehok.
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebanyak 99 Orang PTT.
4. Belanja jasa konsultan Kontruksi terdiri dari jasa Konsultan Perencanaan dan pengawasan pekerjaan rehab gedung kantor dinas berlamat Jl.A.thalib no.45 Telanaipura jambi, pekerjaan rehab gedung aula dan sporthall UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Jl.Pattimura telanai pura Jambi,pekerjaan rehab asrama dan Menara air di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Jl.Pattimura telanaipura Jambi.Belanja Jasa Konsultan perencanaan dan Pengawasan tersebut dengan nilai Sebesar Rp. 73.079.000,- akan dilakukan reklasifikasi ke nilai gedung dan Bangunan dan menambah nilai aset pada gedung tersebut.
5. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan realisasi sebesar Rp. 44.957.000,00 dan Belanja Jasa Konsultan Pengawasan dengan Realisasi sebesar Rp. 28.122.000,00 dan Masing masing belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan tersebut direklas ke Belanja Modal Gedung Kantor,Gedung Olahraga,Gedung tempat Pertemuan,Bangunan Parkir Linjamsos,Bangunan Gedung Asrama/Mess/tempat peristirahatan,dan bangunan Menara air.
6. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebanyak 2 Orang ASN Pejabat eselon III pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi.

5.2.5 Belanja Pemeliharaan**31 Desember 2023**
Rp. 153.841.500,-**31 Desember 2022**
Rp. 4.824.277.528,84,-

Belanja Pemeliharaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 154.436.620,- dengan realisasi sebesar Rp. **153.841.500,-** atau sebesar 99,61% dari anggarannya, turun sebesar Rp. 4.670.436.028,84,00 atau sebesar 96,81% dari realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp. **4.824.277.528,84,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Periode 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.936.620	6 67.441.500,00	99,61	781.339.874,00
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.500.000	86.400.000	99,88	4.042.937.654,84
	Jumlah	154.436.620	153.841.500	99,61	4.042.937.654,84

Belanja Pemeliharaan Meliputi:

- 1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Pendingin Pemeliharaan AC, Personal Komputer Pemeliharaan Komputer PC, Laptop Peralatan Personal Komputer Pemeliharaan Printer Alat kantor Lainnya pemeliharaan CCTV dan Alat Laboratorium.
2. Belanja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti Jl.Jend.Sudirman Thehok.

5.2.6 Belanja Perjalanan Dinas**31 Desember 2023**
Rp. 4.085.485.577,-**31 Desember 2022**
Rp. 4.596.995.754,-

Belanja Pemeliharaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 4.157.786.724,- dengan realisasi sebesar Rp. **4.085.485.577,-** atau sebesar 99,61% dari anggarannya, turun sebesar Rp. 511.510.177,00 atau sebesar 11,13% dari realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp. **4.596.995.754,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.995.786.724,00	3.923.485.577,00	98,19	4.596.995.754,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	0
	Jumlah	154.436.620,00	153.841.500,00	99,61	4.596.995.754,00

5.2.7 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 1.909.812.781,- **Rp. 1.032.000.000,-**

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. **1.909.812.781,-** dengan realisasi sebesar Rp. **4.085.485.577,-** atau sebesar 98,59% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 877.812.781,00 atau sebesar 85,06% dari realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp. **1.032.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	956.600.000,00	941.000.000,00	98,37	1.030.000.000,00
2.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	980.530.000,00	968.812.781,00	98,81	2.000.000,00
	Jumlah	1.937.130.000,00	1.909.812.781,00	98,59	1.030.000.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 :

1. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan bantuan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor.817/KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-5/2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Penetapan Daftar Penerimaan dan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi Berupa uang kepada Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Tahun 2023. Adapun Pemberian Bantuan kepada masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 11 Kab/Kota se Provinsi Jambi dengan nominal uang Rp.20.000.000,- per KUBE sebagai berikut :

**Tabel 5.12 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Muaro Jambi
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Wanita Sejahtera	Kunangan	Kebun Hidroponik	20.000.000
2.	Wanita Makmur	Kunangan	Kebun Hidroponik	20.000.000
3.	Mina Mandiri Jaya	Muaro Pijoan	Budi Daya Ikan	20.000.000
4.	Usaha Kue Kanyaho	Maliki air	Kue Basah dan Kering	20.000.000
5	Majeu Busamo	Pelayang Raya	Ternak Sapi	20.000.000
6	Berkat Bunda	Koto Dian	Anyaman Pandan	20.000.000

**Tabel 5.13 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Sarolangun
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Suka Montir baru	Sukasari	Kuliner	20.000.000
2.	Rumah Jahit Ummi	Pauh	Menjahit Pakaian	20.000.000

**Tabel 5.14 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Bungo
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Mekar Jaya	Suka jaya	Toko sembako	20.000.000
2.	Maju Jaya	Suka Jaya	Ternak Kambing	20.000.000
3	Bahagia	Tanah Periuk	Budidaya Ikan	20.000.000

**Tabel 5.15 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Kerinci
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Tebing Tinggi Tailor	Tebing Tinggi	Penjahit Pakaian	20.000.000
2.	Itik Usaha Baru	Koto Baru Hiang	Ternak itik Petelur	20.000.000
3	Senimpik Tailor	Senimpik	Penjahit Pakaian	20.000.000

**Tabel 5.16 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Merangin
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Bunga Mekar	Duarian Betakuk	Kerajinan Tangan	20.000.000
2.	Harapan Jaya	Air Batu	Bibit Sawit	20.000.000
3	Koto Teguh Tani	Koto Teguh	Tanam Kopi	20.000.000

**Tabel 5.17 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Tanjab Timur
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Pinang Merah	Siau Dalam	Budidaya Ikan	20.000.000
2.	Kismika	Mendahara Ilir	Kerupuk Kayu Api	20.000.000
3	Asa Sejahtera	Lagan Ulu	Ternak Kambing	20.000.000

**Tabel 5.18 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Tanjab Barat
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Keluarga Berencana I	Penyabungan	Budidaya Ikan	20.000.000
2.	Keluarga Berencana II	Penyabungan	Budidaya Ikan	20.000.000
3	Keluarga Berencana III	Penyabungan	Budidaya Ikan	20.000.000

**Tabel 5.19 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Batanghari
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Batuah	Terusan	Pembuatan Dayung	20.000.000
2.	Mawar	Pasar Terusan	Budidaya Ikan	20.000.000
3	Cahaya Maju	Simpang Terusan	Kuliner	20.000.000

**Tabel 5.20 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Tebo
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Berjaya	Suka Jaya	Ternak Sapi	20.000.000
2.	Maju Bersama	Teluk Kual	Ternak Sapi	20.000.000
3	Sumber Agung	Sumber Agung	Keripik Tempe	20.000.000

**Tabel 5.21 Bantuan Uang melalui KUBE Kabupaten Kota Jambi
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama KUBE	Desa Kelurahan	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1.	Sinar Rezeki	Olak Kemang	Batik	20.000.000
2.	Mamboo Snack	Paal Lima	Makanan Ringan	20.000.000
3	Jamu Keluarga Harapan	Tambak Sari		20.000.000
4	Mawar Melati	Kebun Handil	Cemilan Ringan	20.000.000
5	Berkah Bersaudara	Simpang III Sipin	Sewa Tenda	20.000.000
6	Tanjung	Jambi Timur	Warung Makanan	20.000.000
7	Aneka Kreasi Bersana	Kenali asam Bawah	Kerajinan Tangan	20.000.000
8	Maju Bersama	Tahtul Yaman	Kerupuk Kemplang	20.000.000
9	Solok Bersama	Danau Sipin	Kue Tradisional	20.000.000
10	OKH Oke	Orang Kayo Hitam	Kue Tradisional	20.000.000
11	Sebrang indah	Ulu Gedong	Kerupuk Ikan	20.000.000
12	Aneka Keripik Berkah	Mayang Mangurai	Makanan Keripik	20.000.000
13	Sarapan Gembira	Mayang Mangurai	Makanan Sarapan	20.000.000
14	Maju Berseri	Wijaya Pura	Makanan Sarapan	20.000.000
15	Segar Dingin	Legok	Minuman Ringan Es	20.000.000
16	Legok Bedikari	Legok	Kue Tradisional	20.000.000

- 1, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2 pada Dinas Sosdukcipil Provinsi Jambi Kendaraan Roda 4 sebanyak 18 Unit kendaraan dinas yang di pelihara.Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebanyak 8 Unit Kendaraan yang di pelihara.
2. Belanja kepada Pihak ketiga jasa Pengamanan pada Dinas Sosdukcipil Provinsi jambi dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi

5.2.8 Belanja Hibah

31 Desember 2023
Rp. 1.145.500.000,00

31 Desember 2022
Rp. 0

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.145.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.145.500.000,00,- atau sebesar 100% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 1.145.500.000,00,00 atau sebesar 100% dari realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.018.500.000	1.018.500.000	100	0
2.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	100	0
	Jumlah	1.145.500.000	1.145.500.000	100	0

Belanja Hibah TA 2023 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1010/KEP-GUB/SOSDUKCAPIL.3-3/XI/2023 Tanggal 28 Nopember 2023 Tentang Penetapan Daftar Nama lembaga Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Permakanan,Bantuan Sarana dan Prasarana,Bantuan Pembangunan Asrama dan Bantuan Pemeliharaan Panti di Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5.23 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Batang Hari
TA 2023**

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Darul Aufa	Jl Ness II Sungai Buluh Kec Muarobulian Kab Batanghari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
2.	Darul Qur'an al-islamy	Sridadi Muara Bulian Kab Batang Hari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
3	Hidayatut Thullab	Jl.Senami Kab Batanghari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
4	Minhajus Sa'adah	Jl.Singo Yuda Rt.04 DusunII Desa Pelayangan Kec.Muara Bulian Kab Batanghari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
5	Para Sahabat	Jl.Jambi-Bungo Rt.001 Desa Pelayangan Kec.Muaro Tembesi Kab Batanghari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
6	Tiara Bakhti	Jl Gajah Mada Rt.08 Kel Rengas Condong Kec Muara Bulian Kab Batanghari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
7	LKSA Ummul Masakin	Jl. Lintas Jambi-Muarabulian Desa Kampung Pulasu Kec Pemayung Kab Batanghari	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Tabel 5.24 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kota Jambi TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Yayasan Kesejahteraan Anak	Jl Angkasa Paal Merah Kec Jambi Selatan Kota Jambi	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Tabel 5.25 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Tebo TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Yayasan Qolbun Salim	Jl Kelapa Sawit Tikungan Sabli Abib Rt.05 Desa Teluk Kembang Jambu Kec Tebo Ulu Kab Tebo	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Tabel 5.26 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Daar al-muflih	Jl Bangko Kerinci Km 52 Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan jambu Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
2	Yayasan Fitrah air Batu	Desa air Batu kec.Renah Pembarep Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
3	Yayasan Riyadul Hilim	Jl Bangko Kerinci Km 24 Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Tabel 5.27 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Daar al-muflih	Jl Bangko Kerinci Km 52 Desa kampung Limo Kecamatan Pangkalan jambu Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
2	Yayasan Fitrah air Batu	Desa air Batu kec.Renah Pembarep Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
3	Yayasan Riyadul Hilim	Jl Bangko Kerinci Km 24 Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
4	An nur Sungai Karing	Brsa Merkeh Kec Rebah Pembarep Kab Merangin	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Tabel 5.28 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Muaro Jambi TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Yayasan Panti asuhan insan aswaja	Jl Jambi-Muara Bulian Km 13 Perum Fanona Residence Blok D No.2 RT.08 Desa Mendalo Darat Kec jaluko Kab Muaro Jambi	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Tabel 5.29 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabuapten Tanjung jabung Barat TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	Muhammadiyah-Aisyiah	Jalan Bhayangkara No.83 Kel Tungkal ilir Kab Tanjung Jabung Barat	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-
2	Panti Asuhan Darul Mustaqim	Jalan Teratai Rt.11 Desa Purwodadi Kec tebing Tinggi KabTanjung Jabung Barat	Permakanan dan Sarana Prasarana	45.925.000,-

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Bantuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	An nur Sungai Karing	Brsa Merkeh Kec Rebah Pembarep Kab Merangin	Pembangunan Asrama	127.000.000,-

5.2 Belanja Modal

31 Desember 2023
Rp. 1.115.869.795,00

31 Desember 2022
Rp. 1.800.592.048,00

Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.158.458.822,00 dengan realisasi sebesar Rp. **1.115.869.795,00** atau sebesar 96,32 %, turun sebesar Rp. 684.722.253,00,- atau sebesar 38.03% dari realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp. 1.800.592.048,00.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.

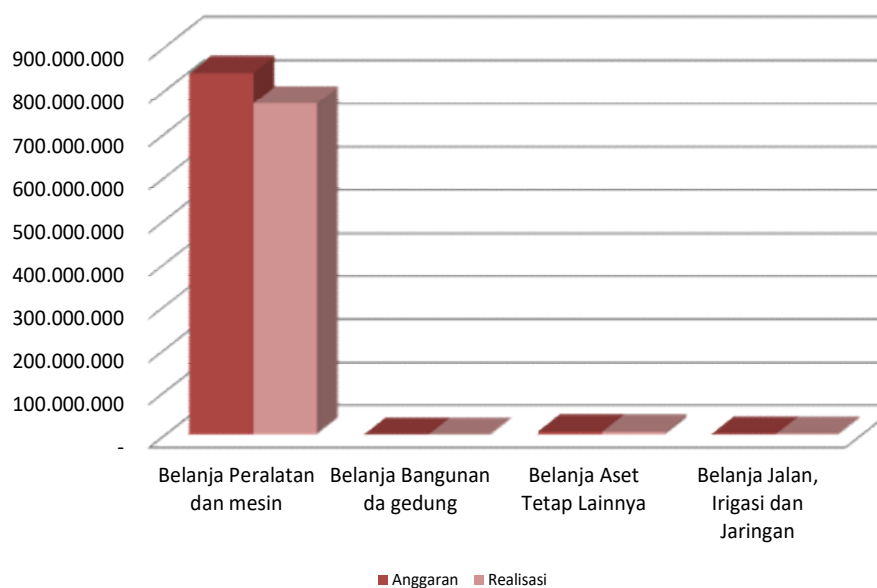
Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	717.058.822,00	678.182.829,00	94,58	1.799.192.048,00
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	440.000.000,00	436.286.966,00	99,16	0
3.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0,00
4.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
Jumlah		1.158.458.822,00	1.115.869.795,00	96,32	1.800.592.048,00

**Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022**



5.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 678.182.829,00 Rp. 1.799.192.048,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 717.058.822,00 dengan realisasi sebesar Rp. 678.182.829,00 atau sebesar 94,58 % dari anggarannya, turun sebesar Rp. 1.121.009.219.00 atau sebesar 62.31 % dari realisasi anggran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp. 1.799.192.048.00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	4.685.000,00	4.673.000,00	99,74	105.270.300,00
2	Belanja Modal Alat Pertanian	1.688.148,00	1.680.000,00	99,52	0
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	429.314.014,00	409.195.026,00	95,31	1.138.442.451,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.984.000,00	11.984.000	100,00	20.544.000,00
5	Belanja Modal Komputer	141.170.000,00	124.754.991,00	88,37	418.935.497,00
6	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	77.700.000,00	77.000.000,00	99,10	0
7	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	873.180,00	864.000,00	98,95	870.000,00
8	Belanja Modal Alat Peraga	41.136.480,00	39.947.200,00	97,11	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.508.000,00	8.084.612,00	95,02	51.693.800,00
	Jumlah	717.058.822,00	678.182.829,00	94,58	1.799.192.048,00

Belanja Peralatan dan mesin Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alat Besar
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Modal Alat Besar	4		3.870.000	
	Belanja Modal Alat Bantu	4		3.870.000	
	Mesin Air PS103BIT	1	803.000	803.000	
	Mesin air	3	1.290.000,00	3.870.000	

**Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alat Pertanian
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Modal Alat Pertanian	3	560.000,00	1.680.000,00	
	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3	560.000,00	1.680.000,00	
	Angkong	3	560.000,00	1.680.000,00	

**Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14		25.488.040,00	
	Belanja Modal Alat kantor				
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14		25.488.040,00	
	Tangga Aluminium	3	849.600,00	2.548.800	
	Tadmon	2	1.327.500,00	2.655.000	
	UPS	7	2.700.000,00	18.900.000	
	Stand Mic	2	692.120,00	1.384.240	
2	Belanja Modal Alat Pendingin	2	8.789.640,00	17.579.280,00	
	AC 2 PK	2	8.789.640,00	17.579.280,00	
3	Belanja Modal Alat Dapur	2	546.000,00	1.092.000,00	
	Kompor Gas	2	546.000,00	1.092.000,00	
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
	Blender	2	690.000	1.380.000,00	
	Bros WC	10	20.000,00	200.000,00	
	Keranjang Sampah	10	70.400,00	704.000,00	
	Keranjang sampah besar	2	190.000,00	380.000,00	
	Keset Kaki buldru tebal	10	40.900,00	409.000,00	
	Obat nyamuk semprot	25	33.400,00	835.000,00	Extracountble
	Pewangi kamar mandi	25	12.560,00	314.000,00	
	Sapu bulu ayam	10	21.400,00	214.000,00	
	Sapu lantai	15	21.333,00	320.000,00	
	Sikat Gigi	60	16.500,00	990.000,00	
	Sandal	127	19.000,00	2.413.000,00	
	Meja Makan	5	2.200.000	11.000.000,00	
	Setrika	4	508.000,00	2.032.000,00	
	Sandal	30	19.000,00	570.000,00	
	Filing kabinet	1	3.550.000	3.550.000	
	Lemari Arsip	4	3.167.100	12.668,400	
	Magicom MCM 638 1.8	5	511.884	2.559.420,00	

	Liter				
	Periok Nasi Besar	2	265.500	531.000,00	
	Sendok Makan Stenlis	30	42.480	1.274.400,00	
	Piring Makan Durallex	25	61.950	1.548.750,00	
	Tabung Gas 12 Kg	2	549.585	1.099.170,00	
	Kasur	10	529.000,00	5.290.000,00	
	Sprei	127	234.000,00	29.718.000,00	
	Sajadah	8	70.000,00	560.000,00	
	Sprei	8	529.000,00	4.232.000,00	
	Kasur Bahan spon	5	529.000,00	2.645.000,00	
	Sprei	60	233.500,00	14.010.000,00	
	Box MCB	5	63.500,00	317.500,00	
	MCB	4	66.000,00	264.000,00	
	Desk Fan	6	226.000,00	1.356.000,00	
	Bros wc	8	20.100,00	160.800,00	
	Keranjang sampah Tutup	8	70.000,00	560.000,00	
	Keset Kaki	16	40.900,00	654.400,00	
	Kemoceng/Bulu ayam	8	21.400,00	171.200,00	
	Sapu Lantai	30	21.300,00	639.000,00	
	Gorden	70	300.000,00	21.000.000,00	
	Teko Ceret	3	235.000,00	705.000,00	
	Termos Nasi	2	147.000,00	294.000,00	
	Gorden	17	300.000,00	5.100.000,00	
	Gelas Mug	28	226.000,00	6.328.000,00	
	Pisau dapur	4	26.000,00	104.000,00	
	Pisau dapur	4	323.000,00	1.292.000,00	
	Tempat Tidur	5	3.850.000,00	19.250.000,00	
	Mesin cuci	1	3.660.000,00	3.660.000,00	
	Tempat Tidur	5	4.100.000,00	20.500.000,00	
	Kolam Terpal	2	4.750.000,00	9.500.000,00	

	Lemari Jati Pakaian	4	4.965.000,00	19.860.000,00	
	Gorden	10	711.400,00	7.114.000,00	
	gorden	8	840.000,00	5.691.200,00	
	Kasur Busa	72	711.400,00	60.480.000,00	
	Bantal Busa	127	55.000,00	6.985.000,00	
	Sarung Bantal	5	500.000,00	2.500.000,00	
	Setrika	10	1.600.000,00	16.000.000,00	
	Setrika	5	633.000,00	3.165.000,00	
	Lemari Pakaian	3	2.100.000,00	6.300.000,00	
	Kipas angin	127	55.000,00	6.985.000,00	
	Meja Kerja 1/2 Biro	5	500.000,00	2.500.000,00	
	Exhaust Fan	4	511.000,00	2.044.000,00	
	Umbul umbul	40	130.000,00	5.200.000,00	
	Tabung Gas 12 Kg dan isi	2	620.000,00	1.240.000,00	
	Lemari kaca /obat	1	5.850.000,00	5.850.000,00	
	Televisi	1	6.586.466,00	6.586.466,00	
	Televisi 32 Inchi	1	3.028.000,00	3.028.000,00	
	Dispenser	1	2.104.000,00	2.104.000,00	
	Kursi Kerja Putar	5	1.319.000,00	6.595.000,00	

**Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4		11.984.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4		11.984.000	
	Timbangan digital plus pengukur	2	3.240.000	6.480.000,00	
	Kursi Roda	2	2.752.000	5.504.000,00	

**Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Komputer	10		124.754.991.00	
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5		76.000.000.00	
	Komputer PC	2	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Laptop	2	9.000.000,00	18.000.000,00	
	Notbook	1	18.000.000,00	18.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2		40.000.000.00	
	Komputer PC	2	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3		8.754.991.00	
	Printer	1	2.584.991,00	2.584.991,00	
	Printer	2	3.085.000,00	6.170.000,00	

**Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2	38.500.000,00	77.000.000	
	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	2	38.500.000,00	77.000.000	
	Depot air minum isi ulang	2	38.500.000,00	77.000.000	

**Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	18	48.000,00	864.000,00	
	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	18	48.000,00	864.000,00	
	Celemek	18	48.000,00	864.000,00	

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga

Periode 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Alat Peraga	39.947.200	39.947.200		
	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	39.947.200	39.947.200		
	Cetakan Konblok	2	250.000,00	500.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Sendok Semen	5	17.000,00	85.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Tongkat pemukul konblok	2	150.000,00	300.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	pasir	1	1.500.000,00	1.500.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	semen	9	70.000,00	630.000,00	
	cangkul	2	150.000,00	300.000,00	
	abu batu	1	1.200.000,00	1.200.000,00	
	ayakan pasir	1	385.000,00	385.000,00	
	ember	5	20.000,00	100.000,00	
	Canting Batik	4	18.000,00	72.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Lilin Malam	6	17.000,00	102.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kompor Batik	2	319.000,00	638.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain Mori	20	35.000,00	700.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gawangan	3	135.000,00	405.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Pewarna set Lengkap	2	350.000,00	700.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Water glass batik 1 Kg	2	20.000,00	40.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Tawas	2	10.000,00	20.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Soda Ash	5	12.000,00	60.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kapur sirih 10 Grm	5	10.000,00	50.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kuas	5	20.000,00	100.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Baskom kecil Stainless	5	15.000,00	75.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Panci kecil	1	37.000,00	37.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Panci besar	1	150.000,00	150.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Penggaris besi				Reklas ke Bi

		5	30.000,00	150.000,00	Extracountable
	Timbangan digital kecil	2	23.000,00	46.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Penjepit Jemuran	4	15.000,00	60.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Tali Jemuran	4	15.000,00	60.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Alat Make up	1	130.000,00	130.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gunting rambut biasa/caca	1	135.000,00	135.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Mesin Cukur/Clipper	1	327.000,00	327.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Cukur Jenggot	1	51.000,00	51.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain kep	1	21.000,00	21.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jepitan Rambut Cocor bebek	1	65.000,00	65.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Mesin catok Rambut	1	170.000,00	170.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Hair drayer	1	126.000,00	126.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Roll Rambut	1	20.000,00	20.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Penjepit rambut kecil	1	10.000,00	10.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Poster gambar rambut laki/perempuan	2	10.000,00	20.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Cream Rambut	1	175.000,00	175.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Bros/Kuas Rambut	1	42.000,00	42.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Botol Spray	1	10.000,00	10.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Handuk Kecil	1	12.000,00	12.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Minyak Mustika Ratu	4	25.000,00	100.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Handuk sedang	4	12.000,00	48.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Alkohol 70%	1	73.000,00	73.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Benang Jahit	20	34.400,00	688.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Meteran baju	8	4.700,00	37.600,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain Polos	30	23.900,00	717.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Dedelan Benang	10	9.700,00	97.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gunting	6	19.400,00	116.400,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Buku Pola Dasar menjahit	15	19.700,00	295.500,00	Reklas ke Bi Extracountable

	Pensil Jahit Merah/Biru	15	11.400,00	171.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Skala Jahit	15	7.400,00	111.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Set Penggaris Pola	10	7.700,00	77.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Karbon Jahit	10	4.800,00	48.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kapur Jahit	5	4.400,00	22.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jarum Pentul	5	6.400,00	32.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Manik Manik	5	43.900,00	219.500,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Tali koor	10	218.900,00	2.189.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Tangsi	6	4.400,00	26.400,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Pengait Konektor	6	4.400,00	26.400,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gantungan Kunci	6	7.400,00	44.400,00	Reklas ke Bi Extracountable
	peniti	6	4.500,00	27.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jarum Singer	10	14.600,00	146.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Rader Besi	5	14.400,00	72.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gunting Pin potong Benang	3	14.500,00	43.500,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Resleting	15	14.200,00	213.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Hak Celana	10	24.500,00	245.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Minyak Singer	10	9.600,00	96.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain Batik	25	24.400,00	610.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	mata Nenek	10	4.500,00	45.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jarum Tangan	5	4.700,00	23.500,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jarum Mesin	10	4.700,00	47.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kompore listrik membatik	10	244.900,00	2.449.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	lilin batik	30	25.700,00	771.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	canting membatik	13	14.700,00	191.100,00	Reklas ke Bi Extracountable
	kain polos untuk membatik organik	30	69.600,00	2.088.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	kain polos untuk membatik mori	20	14.800,00	296.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	water glass batik	10	14.700,00	147.000,00	Reklas ke Bi Extracountable

	paket pewarna tie dye 3 remasol	10	49.800,00	498.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	soda ash penguat warna batik	15	9.800,00	147.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	sarung tangan membatik	10	14.700,00	147.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	fiknasol	10	14.800,00	148.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	kuas batik	10	24.700,00	247.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	kapur batik	10	54.800,00	548.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	gunting sedang	2	43.450,00	86.900,00	Reklas ke Bi Extracountable
	warna remazol	10	54.700,00	547.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Benang Jahit	20	35.000,00	700.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Meteran Baju	8	5.000,00	40.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain Polos	50	25.000,00	1.250.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Dedelan benang	15	10.000,00	150.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gunting Sedang	9	20.000,00	180.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	koran bekas	10	20.000,00	200.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Pensil Jahit Merah/Biru	15	12.000,00	180.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Skala Jahit	15	8.000,00	120.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Set penggaris pola	5	8.000,00	40.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Karbon jahit	5	5.000,00	25.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kapur Jahit	5	4.000,00	20.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jarum Pentul	25	7.000,00	175.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Anyaman Tas Tali Jali	40	55.000,00	2.200.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Pengait konektor	6	5.000,00	30.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gantungan kunci	6	8.000,00	48.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Peniti	6	5.000,00	30.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Jarum singer	10	15.000,00	150.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gunting pin potong benang	3	15.000,00	45.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Resleting	12	15.000,00	180.000,00	Reklas ke Bi Extracountable

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
----	--------	---------------	-------------	--------	------------

	Minyak singer	10	10.000,00	100.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain batik	60	25.000,00	1.500.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kompore Listrik Membatik	10	250.000,00	2.500.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Lilin batik	10	25.000,00	250.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Ember	10	10.000,00	100.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Lem Setan	10	5.500,00	55.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kompore Portable	2	300.000,00	600.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	gas isi ulang	3	260.000,00	780.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain Polos untuk Membatik Organik	20	70.000,00	1.400.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kain Polos untuk Membatik Mori	40	15.000,00	600.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	WATER GLASS BATIK	20	15.000,00	300.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Paket pewarna Tie dye 3 Remasol	10	50.000,00	500.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Soda ASH Penguat warna batik	10	10.000,00	100.000,00	
	Sarung tangan Membatik	10	15.000,00	150.000,00	
	Fixanol	10	15.000,00	150.000,00	
	Gunting Kecil	2	13.500,00	27.000,00	
	Kapur Batik	5	55.000,00	275.000,00	

**Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	37	8.084.612,00	8.084.612,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	37	8.084.612,00	8.084.612,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kaos Kaki	25	66.584,48	1.664.612,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Bola Pingpong	8	480.000,00	3.840.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Net Pingpong	4	645.000,00	2.580.000,00	Reklas ke Bi Extracountable

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Periode 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	37	8.084.612.00	8.084.612.00	Reklas ke Bi Extracountable
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	37	8.084.612.00	8.084.612.00	Reklas ke Bi Extracountable
	Kaos Kaki	25	66.584,48	1.664.612,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Bola Pingpong	8	480.000,00	3.840.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Net Pingpong	4	645.000,00	2.580.000,00	Reklas ke Bi Extracountable

5.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp. 436.286.966,00 **Rp. 0,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 440.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 436.286.966,00 atau sebesar 99,16% dari anggarannya, Naik sebesar Rp. 436.286.966 atau sebesar 100.00% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Periode 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	440.000.000	436.286.966,00	99,16	0
	Jumlah	440.000.000	436.286.966,00	99,16	0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Bangunan gedung kantor tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.44 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Periode 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2	436.286.966,00	436.286.966,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2	436.286.966,00	436.286.966,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gedung sekretariat		26.392.750,00	26.392.750,00	
	Gedung Bidang Fakir Miskin		16.533.000,00	16.533.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Parkiran Linjamsos	1	35.826.000,00	35.826.000,00	Reklas ke Bangunan Parkir
	Gedung Pelayanan		13.779.400,00	13.779.400,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Gedung Arsip		6.666.000,00	6.666.000,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Rehab Hall Badminton		40.046.636,00	40.046.636,00	Reklas ke gedung Olahraga
	Aula		39.525.020,00	39.525.020,00	Reklas ke gedung pertemuan
	Rehab Asrama Cempaka		34.538.940,00	34.538.940,00	Reklas ke gedung Mess/asrama
	Rehab Asrama Mawar		26.531.300,00	26.531.300,00	Reklas ke gedung Mess/asrama
	Rehab Asrama Melati		14.360.880,00	14.360.880,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Bangunan Tempat Pendidikan Menjahit		3.576.500,00	3.576.500,00	Reklas ke Bi Extracountable
	Menara Air	1	178.510.540,00	178.510.540,00	Reklas ke bangunan Menara

5.3.4 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 1.400.000,00 Rp. 1.400.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 1.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.400.000,00 atau sebesar 100 % dari anggarannya, naik sebesar Rp. 1.400.000,00 atau sebesar 100 % dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp. 1.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Musik	1.400.000	1.400.000	99,10	1.400.000
	Jumlah	1.400.000	1.400.000	99,10	1.400.000

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Alat Musik dengan nilai sebesar Rp.1.400.000,- sebanyak 4 Unit Gitar di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Jl.Pattimura Telanaipura Jambi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.46 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Barang	Hrga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Belanja Modal Alat Musik	4	350.000	1.400.000	
	Gitar	4	350.000	1.400.000	

6. Aset

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp. 28.548.305.042,76

Rp. 28.283.714.271,98

Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 28.548.305.042,76,-** turun sebesar Rp. 264.590.770,78 atau 9,28% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **28.283.714.271,98,-**

6.1 Aset Lancar

31 Desember 2023
Rp. 581.463.280,-

31 Desember 2022
Rp. 317.587.678,-

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 581.463.280,-** naik sebesar Rp. 263.875.602,- atau 83.09% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 317.587.678,-. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.1.01	Kas dan Setara Kas	(37.987.895.577,00)	0,00
2.	1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(37.987.895.577,00)	0,00
3.	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(37.987.895.577,00)	0,00
4.	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(37.987.895.577,00)	0,00
5.	1.1.12	Persediaan	581.463.280,00	317.587.678,00
6.	1.1.12.01	Barang Pakai Habis	581.463.280,00	317.587.678,00
7.	1.1.12.01.01	Bahan	0,00	37.492.600,00
8.	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	37.492.600,00
9.	1.1.12.01.02	Suku Cadang	278.700.000,00	0,00
10.	1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	278.700.000,00	0,00
11.	1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	20.539.706,00	167.159.528,00
12.	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	11.002.192,00	5.103.577,00
13.	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	6.536.944,00	1.935.400,00
14.	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.570,00	160.120.551,00
15.	1.1.12.01.04	Obat-obatan	4.937.427,00	7.665.250,00
16.	1.1.12.01.04.0001	Obat	4.937.427,00	7.665.250,00
17.	1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	277.286.147,00	105.270.300,00

(dalam rupiah)

No.		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
18.	1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	216.360.540,00	105.270.300,00
19.	1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	60.925.607,00	0,00
20.	1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	37.987.895.577,00	0,00
21.	1.1.13.01	RK SKPD	37.987.895.577,00	0,00
22.	1.1.13.01.01	RK SKPD	37.987.895.577,00	0,00
23.	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	37.987.895.577,00	0,00
		JUMLAH ASET LANCAR	581.463.280,00	317.587.678,00

6.2 Kas dan Setara Kas **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp. (37.987.895.577,00) **Rp.0**

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (37.987.895.577,00),- dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 6.2 Rincian Kas dan Setara Kas
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.1.01	Kas dan Setara Kas	(37.987.895.577,00)	0,00
2.	1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(37.987.895.577,00)	0,00
3.	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(37.987.895.577,00)	0,00
4.	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(37.987.895.577,00)	0,00
		Jumlah Kas dan Setara Kas	(37.987.895.577,00)	0,00

6.2.1 Persediaan**31 Desember 2023**
Rp. 581.463.280,-**31 Desember 2022**
Rp. 317.587.678,-

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 581.463.280,-** naik sebesar Rp. 263.875.602,- atau 83.09% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 317.587.678,-**

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 6.3 Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.1.12	Persediaan	581.463.280,00	317.587.678,00
2.	1.1.12.01	Barang Pakai Habis	581.463.280,00	317.587.678,00
3.	1.1.12.01.01	Bahan	0,00	37.492.600,00
4.	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	37.492.600,00
5.	1.1.12.01.02	Suku Cadang	278.700.000,00	0,00
6.	1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	278.700.000,00	0,00
7.	1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	20.539.706,00	167.159.528,00
8.	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	11.002.192,00	5.103.577,00
9.	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	6.536.944,00	1.935.400,00
10.	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.570,00	160.120.551,00
11.	1.1.12.01.04	Obat-obatan	4.937.427,00	7.665.250,00
12.	1.1.12.01.04.0001	Obat	4.937.427,00	7.665.250,00
13.	1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	277.286.147,00	105.270.300,00
14.	1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	216.360.540,00	105.270.300,00
15.	1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	60.925.607,00	0,00

Persediaan per 31 Desember 2023 Pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.4.233.716.00,- merupakan persediaan dari Alat Tulis kantor Dinas,UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebagai berikut :

**Tabel 6.4 Rincian Persediaan Alat Tulis kantor Dinas
per Per 31 Desember 2022**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Staples	2 Kotak	11.200,-	22.400,-	Dinas
2	Buku Kwitansi	1 Buku	7.600,-	7.600,-	
3	Plastik Transparan asahi	1 Pcs	55.000,-	55.000,-	
4	Calculator Digit 16	1 Buah	205.000,-	205.000,-	
5	Amplop Coklat	1 Pcs	55.000,-	55.000,-	
6	Amplop 550 Grm	1 Kotak	22.700,-	22.700,-	
7	Ballpoint Pilot Balliner	2 Lusin	195.500,-	391.000,-	
8	Refil Spidol White board	1 Pcs	19.600,-	19.600,-	
9	Tinta stempel	1 Btl	8.500,-	8.500,-	
10	Binder klip 105	6 Kotak	8.800,-	52.800,-	
11	Binder klip200	1 Kotak	22.800,-	22.800,-	
12	Tip ex	2 Kotak	9.700,-	19.400,-	
13	Buku agenda	2 Buku	23.500,-	47.000,-	
14	Pisau cutter besar	2 Buah	26.000,-	52.000,-	
15	Pita mesin ketik	2 Kotak	39.000,-	78.000,-	
16	Kertas HVS F4 70 Grm	1 rim	60.000,-	60.000,-	
	Jumlah			1.118.800,-	

**Tabel 6.5 Rincian Persediaan Alat Tulis kantor UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Amplop Putih No.90	3 Pak	23.000,-	69.000,-	Dinas
2	Buku Agenda	2 buku	23.500,-	47.000,-	
3	Buku Kwitansi	4 Pcs	10.600,-	42.400,-	
4	Buku Nota kontan	2 Buku	7.000,-	14.000,-	
5	Buku tulis kwarto	1 Buku	7.200,-	7.200,-	
6	Lakban	5 Roll	12.000,-	60.000,-	
7	Amplop Putih 500gr	2 Pak	17.300,-	34.600,-	
8	Amplop Coklat	1 Pak	77.800,-	77.800,-	
9	Amplop putih No.104	1 Kotak	23.000,-	23.000,-	
10	Ballpoint pilot BPPT	3 Lusin	32.500,-	97.500,-	
11	Binder klip No.155	1 Kotak	8.800,-	8.800,-	
12	Buku agenda	2 Buku	23.500,-	47.000,-	
13	Buku ekspedisi	3 Buah	17.500,-	52.500,-	
14	Buku Kwitansi besar	3 Pcs	7.600,-	22.800,-	
15	Buku tulis folio	2 Buku	15.400,-	30.800,-	
16	Kertas bergaris	2 Pak	33.000,-	66.000,-	
17	Kertas HVS F4 70grm	5 Rim	60.000,-	300.000,-	
18	Lakban	2 Roll	12.000,-	24.000,-	
19	Map biasa	50 Buah	2.200,-	110.000,-	
20	Map dokumen folio	3 Buah	21.200,-	63.600,-	
21	Map Plastik folio	10 Buah	6.000,-	60.000,-	
22	Map Sneleghter	3 Buah	7.200,-	21.600,-	
23	Paper Klip	7 Kotak	2.000,-	14.000,-	
24	Pelubang kertas	1 Buah	29.700,-	29.700,-	
25	Pensil 2B FC	2 Lusin	51.900,-	103.800,-	
26	Isi Pisau Cutter	1 Kotak	5.900,-	5.900,-	
27	Pisau Cutter	1 Buah	26.059,-	26.059,-	
28	Pos it	3 Pak	8.500,-	25.500,-	
29	Stapler no.10	1 Pcs	18.500,-	18.500,-	
30	Buku tulis Folio isi 100	2 Lusin	195.052,-	390.104,-	
31	Penghapus Kecil	7 Pcs	3.500,-	24.500,-	
32	Tempat Pensil	4 Pcs	48.500,-	194.000,-	
33	Catridge warna hitam	1 Buah	264.264,-	264.264,-	
34	Tinta/Toner Printer hitam	3 Botol	70.000,-	210.000,-	
Jumlah				2.585.927,-	

**Tabel 6.6 Rincian Persediaan Alat Tulis kantor UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Kertas HVS Folio F4 70 Gram	5 rim	60.000,-	300.000,-	
2	Buku Folio isi 100 lembar	3 buku	15.400,-	46.200,-	
3	Pena	1 lusin	42.689,-	42.689,-	
4	Staples No.10	1 kotak	18.500,-	18.500,-	
5	Map	1 buah	35.700,-	35.700,-	
6	Map Bening	1 buah	31.500,-	31.500,-	
7	Amplop putih No.110	1 kotak	17.300,-	17.300,-	
8	Penggaris besi 30cm	1 Pcs	7.900,-	7.900,-	
9	Buku nota besar	2 buku	7.000,-	14.000,-	
10	Kwitansi besar	2 buah	7.600,-	15.200,-	
Jumlah				528.989,-	

2. Bahan Obat obatan

Persediaan Bahan Obat obatan sebesar Rp.1.750.167,- merupakan persediaan Bahan Obat obatan di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi terdiri dari :

**Tabel 6.7 Rincian Persediaan Bahan Obat obatan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Alkohol 70%	2 Botol	23.605,-	47.218,-	UPTD PSBAWEP
2	Hand Sanitiser	6 Botol	25.168,-	151.000,-	
3	Kapas Steril	10 Kg	82.225,-	822.250,-	
4	Sabun Cuci Tangan	4 Botol	33.194,-	132.776,-	
5	Amoxilin 500mg	100 Tablet	309,-	30.900,-	
6	Antasidadoen tablet kunyah	100 Tablet	264,-	26.400,-	
7	Generik alopurinol	30 Tablet	136,-	4.080,-	
8	Kasa Steril	6 lembar	12.936,-	77.616,-	
9	Paracetamol 500mg	100 Tablet	47,-	4.700,-	
10	Piroxicam 10mg	4 Tablet	12.936,-	51.744,-	
11	Sinvastatin 10mg	50 Tablet	153,-	7.650,-	
Jumlah				1.356.342,-	

**Tabel 6.8 Rincian Persediaan Bahan Obat obatan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Piroxicam, 10 mg	50 Tablet	198,-	9.900,-	UPTD PSTW
2	Amoxilin, 500 mg	300 Tablet	309,-	92.700,-	
3	Antacida Doen	200 Tablet	264,-	52.800,-	
4	Vit B complex tablet	100 Tablet	155,-	15.500,-	
5	Ibuprofen, 200 mg	300 Tablet	136,-	40.000,-	
67	Natrium Diklofenat, 50 mg	100 Tablet	176,-	17.600,-	
8	Captopril 12,5 mg	200 Tablet	83,-	16.600,-	
9	Salbutamol sulfate, 2 mg	300 Tablet	80,-	24.000,-	
10	Hidrokortison salep	7 Tube	3.115,-	21.805,-	
11	Masker, isi 50	1 Box	26.620,-	26.620,-	
12	Dexamethasone, 0,5 mg	100 Tablet	47,-	4.700,-	
13	Ambroxol, 30 mg	80 Tablet	555,-	44.400,-	
14	Amlodipine, 5 mg	80 Tablet	95,-	7.600,-	
15	Paracetamol 500grm	400 Tablet	47,-	18.800,-	
	Jumlah			393.825,-	

3. Bahan Kebersihan

Persediaan Bahan Kebersihan sebesar Rp.8.037.258,- merupakan persediaan Bahan Kebersihan di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi terdiri dari :

**Tabel 6.9 Rincian Persediaan Bahan Kebersihan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Bros WC	6 Buah	20.054,-	120.324,-	PSBAWEP
2	Ember besar Pakai Tutup	3 Buah	234.418,-	703.254,-	
3	Ember bahan plastik/besi	4 Buah	41.202,-	164.808,-	
4	Gayung air	6 Buah	13.936,-	83.616,-	
5	kain lap	1 Lusin	83.502,-	83.502,-	
6	Kapur Barus	1 Buah	7.025,-	7.025,-	
7	Keranjang Sampah	7 Buah	70.473,-	493.311,-	
8	Keset kaki bludru tebal	5 Buah	40.901,-	204.505,-	
9	Pel dorong+sumbu	9 Buah	20.961,-	188.649,-	
10	Pembesih Tegel/porselin	8 Botol	22.433,-	179.464,-	
11	Pengki Plastik	3 Buah	21.000,-	63.000,-	

12	Sapu Bulu Ayam	5 Buah	21.414,-	107.070,-	
13	Sapu Lantai	11 Buah	21.358,-	234.938,-	
14	Sapu Lidi	8 Buah	8.470,-	67.760,-	
15	Baskom Plastik	3 Buah	77.724,-	233.172,-	
16	Bros Lantai	7 Buah	11.772,-	82.404,-	
17	Bros WC	6 Buah	20.054,-	120.324,-	
18	Ember	12 Buah	57.556,-	690.672,-	
19	Pel dorong+sumbu	12 Buah	20.961,-	251.532,-	
20	Serokan sampah	8 Buah	24.385,-	195.080,-	
21	Tempat sampah	6 Buah	42.350,-	254.100,-	
22	Ember	3 Buah	234.418,-	703.254,-	
23	Lap Pembersih Tangan	2 Buah	33.000,-	66.000,-	
24	Sapu lantai	6 Buah	21.358,-	128.148,-	
25	Gayung air	2 Buah	13.936,-	27.872,-	
26	Pasta Gigi	1 Kotak	5.900,-	5.900,-	
27	Sabun Mandi	1 Buah	26.059,-	26.059,-	
28	Shampo	3 Pak	8.500,-	25.500,-	
29	Sikat Gigi	1 Pcs	18.500,-	18.500,-	
30	Sabun bubuk/deterjen	2 Lusin	195.052,-	390.104,-	
Jumlah				7.612.758,-	

**Tabel 6.10 Rincian Persediaan Bahan Kebersihan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Pel dorong+sumbu	4 Buah	18.500,-	74.000,-	UPTD PSTW
2	Sapu lantai plastik	5 Buah	36.300,-	181.500,-	
3	Bros wc bertangkai	1 Buah	18.000,-	18.000,-	
4	Ember Plastik	4 Buah	25.000,-	100.000,-	
5	Bros kamar mandi bertangkai	2 Buah	17.000,-	34.000,-	
6	alat semprot obat nyamuk cair	1 Buah	17.000,-	17.000,-	
Jumlah				424.500,-	

4. Bahan Makanan

Persediaan Bahan Makanan sebesar Rp.64.090.750,- merupakan persediaan Bahan Makanan untuk Bencana Sosial pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terdiri dari :

**Tabel 6.11 Rincian Persediaan Bahan Makanan Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Mie rebus	5016 Pcs	3.075,-	15.424.200,-	Dinas
2	Gula	627 Kg	15.175,-	9.514.725,-	
3	Roti Kaleng	627 Kaleng	44.950,-	28.183.650,-	
4	Sarden Bantan	1254 Kaleng	9.100,-	11.411.400,-	
5	Susu Kental Manis	627 Kaleng	11.175,-	7.006.725,-	
6	teh.	627 Kotak	6.425,-	4.028.475,-	
7	Kantong paket	627 Pcs	28.175,-	17.665.725,-	
	Jumlah			93.234.900,-	

5. Bahan Alat Kesehatan

Persediaan Bahan Alat Kesehatan sebesar Rp.304.133.078,- merupakan persediaan Alat kesehatan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya terdiri dari :

**Tabel 6.12 Rincian Persediaan Bahan Alat Kesehatan Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Kursi Roda Sellaco	20 Buah	1.491.000,-	29.820.000,-	
2	Kursi Roda Care	5 Buah	1.265.000,-	6.325.000,-	
3	Kursi Roda Gea	1 Buah	1.265.000,-	1.265.000,-	
4	Tongkat Ketiak Gea	19 Buah	253.000,-	4.807.000,-	
5	Tongkat Kaki 3 Oneheart	19 Buah	145.200,-	2.758.800,-	
6	Tongkat Kaki 4 Gea	18 Buah	143.000,-	2.574.000,-	
7	Masker N95	183 Pcs	20.050,-	3.669.150,-	
8	Thermometer Gun	184 Pcs	450.000,-	82.800.000,-	
9	Masker Media	1819 Pcs	90.000,-	163.710.000,-	
	Jumlah			297.728.950,-	

**Tabel 6.13 Rincian Persediaan Bahan Alat Kesehatan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Total Colesterol test strip	4 Dus	681.927,-	2.727.708,-	
2	Uric acid test strip	5 Dus	735.284,-	3.676.420,-	
	Jumlah			6.404.128,-	

6. Bahan Alat Listrik

Persediaan Bahan Alat Listrik sebesar Rp.6.188.190,- merupakan persediaan Alat Listrik pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya jambi,UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi terdiri dari :

**Tabel 6.14 Rincian Persediaan Bahan Alat Listrik Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Bateray isi 6	10 Buah	26.000,-	260.000,-	
2	Lampu TL 20 Watt	10 roll	152.400,-	1.524.000,-	
3	Lampu Pijar XL 25 watt	15 Buah	144.600,-	2.169.000,-	
4	Lampu emergency	10 Buah	46.500,-	465.000,-	
5	MCB 16A	5 Buah	66.000,-	330.000,-	
	Jumlah			4.748.000,-	

**Tabel 6.15 Rincian Persediaan Bahan Alat Listrik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Fiting Plafon	20 Buah	10.340,-	206.800,-	
2	Lampu Emergency	10 Buah	46.585,-	465.850,-	
3	MCB	5 Unit	66.000,-	330.000,-	
4	Saklar Seri	3 Buah	33.000,-	99.000,-	
5	Stop Kontak	1 Buah	26.500,-	26.500,-	
	Jumlah			6.404.128,-	

Tabel 6.16 Rincian Persediaan Bahan Alat Listrik UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Per 31 Desember 2023

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Lampu 22 Watt	7 Buah	16.500,-	115.500,-	
2	Stop Kontak	3 Buah	21.230,-	63.690,-	
3	Bateray	2 Buah	26.000,-	52.000,-	
4	Piting lampu	7 Buah	11.550,-	80.850,-	
	Jumlah			312.190,-	

6.3 Aset Tetap

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp. 27.963.651.451,09 **Rp. 27.959.455.942,31**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **27.963.651.451,09** turun sebesar Rp. 409.178.275.03 atau 0,02% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **27,959,455,942,31**

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 6.17 Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No .	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.3.01	Tanah		
2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.286.256.913,08	12.413.090.531,08
3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	19.304.852.341,84	19.514.859.155,84
4	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.647.150.913,00	1.958.006.913,00
5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.565.087.948,00	9.575.682.948,00
6	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(16.839.696.664,83)	(15.502.183.605,63)
		JUMLAH ASET TETAP	27.963.651.451,09	27.959.455.942,29

6.3.1 Tanah**31 Desember 2023**
Rp.0,00**31 Desember 2022**
Rp.0,00

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00

6.3.2 Peralatan dan Mesin**31 Desember 2023**
Rp. 13.286.256.913,08**31 Desember 2022**
Rp. 12.413.090.531,08

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 13.286.256.913,08** naik sebesar Rp 873.166.382,00 atau 0,07 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **12.413.090.531,08**. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp	12.413.090.531,08
Mutasi Tambah	Rp	873.166.382,00
Mutasi Kurang	Rp	(490.362.692,00)
Jumlah Nilai perolehan 2023	Rp	13.286.256.913,08

**Tabel 6.18 Rincian Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.3.02.01	Alat Besar	32.670.000,00	0,00
2	1.3.02.01.03	Alat Bantu	32.670.000,00	0,00
3	1.3.02.01.03.0005	Pompa	32.670.000,00	0,00
4	1.3.02.02	Alat Angkutan	3.593.336.597,00	3.731.036.597,00
5	1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.592.936.597,00	3.730.636.597,00
6	1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.006.635.000,00	3.032.135.000,00
7	1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	304.349.347,00	304.349.347,00
8	1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	129.152.250,00	172.952.250,00
9	1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	38.800.000,00	38.800.000,00
10	1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	114.000.000,00	182.400.000,00
11	1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	400.000,00	400.000,00
12	1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	400.000,00	400.000,00
13	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	136.293.000,00	136.293.000,00
14	1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	125.169.000,00	125.169.000,00
15	1.3.02.03.01.0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	125.169.000,00	125.169.000,00

16	1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	11.124.000,00	11.124.000,00
17	1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	11.124.000,00	11.124.000,00
18	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.274.012.810,00	5.124.800.664,00
19	1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.199.663.346,00	1.179.828.946,00
20	1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	4.640.000,00	4.640.000,00
21	1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.978.000,00	3.978.000,00
22	1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	821.775.846,00	762.166.446,00
23	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	369.269.500,00	409.044.500,00
24	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	3.629.928.868,00	3.513.446.122,00
25	1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.338.892.427,00	1.288.022.427,00
26	1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	524.992,00	524.992,00
27	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	165.633.168,00	161.973.168,00
28	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	563.422.651,00	545.843.371,00
29	1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	153.222.150,00	153.222.150,00
30	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.404.593.380,00	1.360.219.914,00
31	1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.640.100,00	3.640.100,00
32	1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	444.420.596,00	431.525.596,00
33	1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	243.260.927,00	236.960.927,00
34	1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	26.175.000,00	26.175.000,00
35	1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	139.224.909,00	132.629.909,00
36	1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	5.783.360,00	5.783.360,00
37	1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	29.976.400,00	29.976.400,00
38	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.124.861.790,00	504.861.790,00
39	1.3.02.06.01	Alat Studio	1.058.154.550,00	438.154.550,00
40	1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	35.642.300,00	35.642.300,00
41	1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	1.022.512.250,00	402.512.250,00
42	1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	66.707.240,00	66.707.240,00
43	1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	66.707.240,00	66.707.240,00
44	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.299.000,00	23.315.000,00
45	1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	35.299.000,00	23.315.000,00
46	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	35.299.000,00	23.315.000,00
47	1.3.02.08	Alat Laboratorium	15.860.000,00	15.860.000,00
48	1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	15.860.000,00	15.860.000,00
49	1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	15.860.000,00	15.860.000,00

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
50	1.3.02.10	Komputer	2.971.913.716,08	2.851.913.480,08
51	1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.229.260.403,99	2.113.260.403,99
52	1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.229.260.403,99	2.113.260.403,99
53	1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	742.653.312,09	738.653.076,09
54	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	539.948.312,09	526.923.076,09
55	1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	202.705.000,00	211.730.000,00
56	1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	77.000.000,00	0,00
57	1.3.02.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	77.000.000,00	0,00
58	1.3.02.13.03.0002	Alat Pengolahan Air	77.000.000,00	0,00
59	1.3.02.19	Peralatan Olahraga	25.010.000,00	25.010.000,00
60	1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	25.010.000,00	25.010.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin	13.286.256.913,08	12.413.090.531,08

6.3.2.1 Alat Besar

31 Desember 2023
Rp. 32.670.000

31 Desember 2022
Rp. 0

Nilai Alat Besar pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 32.670.000,-** naik sebesar Rp **32.670.000,00** atau 100 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **0**. Rincian mutasi Alat Besar pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 6.19 Alat Besar
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Nilai s/d 2023
	1.3.2.02	Alat Besar		32.670.000,00		32.670.000,00
	1.3.2.02.03	Alat Bantu		32.670.000,00		32.670.000,00
	1.3.2.02.03.05	Pompa		32.670.000,00		32.670.000,00

1	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		5.000.000,00		5.000.000,00
2	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		5.000.000,00		5.000.000,00
3	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		4.200.000,00		4.200.000,00
4	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		4.200.000,00		4.200.000,00
5	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		4.200.000,00		4.200.000,00
6	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		4.200.000,00		4.200.000,00
7	1.3.2.02.03.05.005	Sumersible Pump		2.000.000,00		2.000.000,00
8	1.3.2.02.03.05.010	Pompa Air		1.290.000,00		1.290.000,00
9	1.3.2.02.03.05.010	Pompa Air		1.290.000,00		1.290.000,00
10	1.3.2.02.03.05.010	Pompa Air		1.290.000,00		1.290.000,00

Perolehan Alat Besar tahun 2023 sebesar Rp.32.670.000,- terdiri dari :

1. Pembelian Tahun 2023 sebesar Rp.3.870.000,- Pembelian 3 Unit Mesin Air peruntukan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Jl.Pattimura Telanaipura Jambi.
2. Reklas dari pengadaan Menara Air Bangunan Gedung terdapat barang Peralatan dan mesin berupa
 - 1 Unit Mesin Pompa air sebesar Rp.2.000.000,-
 - dan Tabung PRP sebanyak 6 buah dengan total Rp.26.800.000,- dan peruntukan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Jl.Pattimura Telanaipura Jambi.

6.3.2.2 Alat Angkutan

31 Desember 2023
Rp. 3.593.336.597,00

31 Desember 2022
Rp. 3.731.036.597,00

Nilai Alat Angkutan pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 3.593.336.597,-** turun sebesar Rp **137.700.000,00** atau 3.69 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **3.731.036.597,-**. Berkurangnya Nilai alat Angkutan pada Peralatan dan mesin sebesar Rp.137.700.000,- dikarenakan terdapat alat angkutan yang sudah tidak layak atau rusak berat sehingga dilakukan reklas ke alat Rusak Berat, Rincian mutasi Alat Angkutan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

**Tabel 6.20 Alat Angkutan
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Nilai s/d 2023
	1.3.2.02	Alat Angkutan	3.731.036.597		137.700.000	3.593.336.597
	1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.730.636.597		137.700.000	3.592.936.597
1	1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.032.135.000		25.500.000	3.006.635.000
	1.3.2.02.01.01.006	Multi Purpose Vehicle (MPV)			25.500.000	
2	1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	172.952.250		43.800.000	129.152.250,00
	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor			5.100.000,00	
	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor			5.100.000,00	
	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor			5.100.000,00	
	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor			13.300.000,00	
	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor			15.200.000,00	
3	1.3.2.02.01.06	Kendaraan Bermotor Khusus	182.400.000,00		68.400.000	114.000.000,00
		Mobil Ambulance			68.400.000	

**6.3.3.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 136.293.000,00 Rp. 136.293.000,00**

Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 136.293.000,-** Tidak ada Penambahan maupun pengurangan sampai dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **136.293.000,-**.

**Tabel 6.21 Alat Bengkel dan Alat Ukur
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Nilai s/d 2023
	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	136.293.000,00			136.293.000,00
	1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	125.169.000,00			125.169.000,00
	1.3.02.03.01.0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	125.169.000,00			125.169.000,00
	1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	11.124.000,00			11.124.000,00
	1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	11.124.000,00			11.124.000,00

6.3.2.4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 5.274.012.810,00 Rp. 5.124.800.664,00

Nilai **Alat Kantor dan Rumah Tangga** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.274.012.810,00,-** Naik sebesar Rp.149,212,146,00,- atau sebesar 2,83 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 5.124.800.664,00,-**.

**Tabel 6.22 Alat Kantor dan Rumah Tangga
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Nilai s/d 2023
	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.124.800.664,00	149.212.146,00		5.274.012.810,00
	1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.179.828.946,00	19.834.400,00		1.199.663.346,00
	1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	4.640.000,00			4.640.000,00
	1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.978.000,00			3.978.000,00
	1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	762.166.446,00	59.609.400,00		821.775.846,00
	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	409.044.500,00	39.775.000,00	58.675.000,00	369.269.500,00
	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	3.513.446.122,00	116.482.746,00		3.629.928.868,00

	1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.288.022.427,00	50.870.000,00		1.338.892.427,00
	1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	524.992,00	-		524.992,00
	1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	161.973.168,00	3.660.000,00		165.633.168,00
	1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	545.843.371,00	17.579.280,00		563.422.651,00
	1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	153.222.150,00	-		153.222.150,00
	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.360.219.914,00	44.373.466,00		1.404.593.380,00
	1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.640.100,00	-		3.640.100,00
	1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	431.525.596,00	12.895.000,00		444.420.596,00
	1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	236.960.927,00	6.300.000,00		243.260.927,00
	1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	132.629.909,00	6.595.000,00		139.224.909,00
	1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	5.783.360,00			5.783.360,00
	1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	29.976.400,00			29.976.400,00

Reklas Alat kantor dan Rumah Tangga Pada Alat Kantor Tahun 2023 sebesar Rp. 85.097.440,- sebagai berikut :

I. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

1. Reklas Tambah Nilai Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dari Belanja Barang dan Jasa pengadaan Tahun 2023 berupa 1 unit Etalase Rp.1.681.000,-
2. Reklas Tambah Nilai Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dari Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use Pengadaan Tahun 2023 berupa
 - Pembelian Filing Kabinet sebanyak 1 unit Rp.3.550.000,-
 - Pembelian Lemari Arsip sebanyak 4 Unit nilai total Rp.12.668.400,-
 - Pembelian Lemari Pakaian sebanyak 4 Unit Nilai total Rp.19.860.000,-
 - Pembelian Lemari Pakaian sebanyak 10 Unit Nilai total Rp.16.000.000,-
 - Pembelian Lemari Obat sebanyak 1 Unit Nilai total Rp.5.850.000,-

II. Alat Kantor Lainnya

1. Reklas Kurang Nilai Alat Kantor Lainnya ke Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use pengadaan Tahun 2023 berupa
 - Reklas nilai Tedmon air sebanyak 2 Unit Nilai Total Rp.2.655.000,-
 - Reklas nilai Tangga sebanyak 3 Unit Nilai Total Rp.2.548.800,- reklas ke extracountable nilai dibawah kapitalisasi

- Reklas nilai UPS sebanyak 7 Unit Nilai Total Rp.18.900.000,-
 - Reklas nilai Standmic sebanyak 2 Unit Nilai Total Rp.1.384.200,- reklas ke extracountable nilai dibawah kapitalisasi
 - Reklas nilai Ribbon Fargo/Tinta Komputer Tahun 2021 sebanyak 6 Buah Nilai Total Rp.24.000.000,- reklas ke extracountable nilai dibawah kapitalisasi
 - Reklas nilai Translite Film E-ktp Tahun 2021 sebanyak 2 Buah Nilai Total Rp.4.000.000,- reklas ke extracountable nilai dibawah kapitalisasi
 - Reklas nilai Ribbon Fargo/Tinta Komputer Tahun 2022 sebanyak 15 Buah Nilai Total Rp.30.675.000,- reklas ke extracountable nilai dibawah kapitalisasi
2. Reklas masuk Pralatan dan Mesin Komputer Jaringan dari Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian Lainnya berupa CCTV sebanyak 1 Unit Rp. 9.975.000
 3. Reklas masuk Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Meubelair dari Aset tetap Lainnya Bahan Perpustakaan Tercetak Pot kembang sebanyak 1 Unit Rp.120.000
 4. Reklas masuk Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Rumah Tangga Lainnya Home Use dari Aset tetap Lainnya Bahan Perpustakaan Tercetak Cermin sebanyak 1 Unit Rp.500.000

Alat kantor dan Rumah Tangga terdapat nilai masuk dari Barang dan Jasa Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Reklas Masuk Alat Kantor dan Rumah Tangga Penyimpan Perlengkapan Kantor 1 unit Etalase Rp.1.681.000

Alat Studio Komunikasi dan Pemancar terdapat nilai masuk dari Barang dan Jasa tahun 2023 sebagai berikut :

- 1 Reklas masuk Alat Studio Komunikasi dan Pemancar berupa 2 Unit Mesin Anjungan E-KTP dengan Total Nilai Sebesar Rp. 437.000.000,-

Alat kantor dan Rumah Tangga terdapat nilai masuk dari Penerimaan Hibah Bank Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mesin Anjungan E-Ktp berdasarkan Bast No. Tanggal Nopember 2023 sebanyak 1 Unit dengan Nilai sebesar Rp. 183.000.000

Alat kantor dan Rumah Tangga terdapat nilai Keluar ke Ekstra Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Alat Kantor lainnya nilai perolehan 2022 dengan Nilai Rp.58.675.000,- merupakan barang alat tulis kantor-bahan komputer tinta dan translite film yg merupakan barang habis pakai
2. Alat Komputer pada Jaringan rekla ke aset lain lain software sebesar Rp.19.000.000,-

6.3.2.5 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 1.124.861.790,00 Rp. 504.861.790,00

Nilai **Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.124.861.790,00,- Naik sebesar Rp.660.000.000,00,- atau sebesar 55,12 %** dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 504.861.790,00,-**.

**Tabel 6.23 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
Periode 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	504.861.790,00	620.000.000,00	1.124.861.790,00
	1.3.02.06.01	Alat Studio	438.154.550,00	620.000.000,00	1.058.154.550,00
	1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	35.642.300,00	-	35.642.300,00
	1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	402.512.250,00	620.000.000,00	1.022.512.250,00
	1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	66.707.240,00	-	66.707.240,00
	1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	66.707.240,00	-	66.707.240,00

Alat studio dan Komunikasi dan Pemancar realisasi belanja sebagai berikut :

1. Terdapat Barang Hubah dari Bank Jambi sebanyak 1 Unit Tahun 2022 berdasarkan Ba Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor.2279/Sosdukcapi-6.3/XII 2023 Tanggal 23 Desember 2023 dan tercatat pada Tahun 2023
2. Terdapat Belanja Barang dan Jasa Pada Alat kantor Tahun 2023 Pembelian Mesin E-KTP sebanyak 2 Unit ,
3. Barang Mesin E-KTP tersebut sebanyak 3 Unit di Pinjam Pakai kan pada Kabupaten Muara Jambi berdasarkan Ba Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor.BA/2265/Sosdukcapi-6.3/ XII /2023 Tanggal 23 Desember 2023 Tahun perolehan Barang Tahun 2022.
Kabupaten Merangin berdasarkan Ba Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor.2279/Sosdukcapi-6.3/XII 2023 Tanggal 23 Desember 2023 Tahun perolehan barang 2023
Kabupaten Merangin berdasarkan Ba Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor.2279/Sosdukcapi-6.3/XII 2023 Tanggal 23 Desember 2023 Tahun perolehan barang 2023

6.3.2.6 Alat Kedokteran dan Kesehatan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 35.299.000,00	Rp. 23.315.000,00

Nilai **Alat Kedokteran dan Kesehatan** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 35.299.000,-** Naik sebesar **Rp. 11.984.000** atau sebesar **33,59 %** dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **23.315.000,00,-**.

Tabel 6.24 Alat Kedokteran dan Kesehatan
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.315.000,00	11.984.000,00	35.299.000,00
	1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	23.315.000,00	11.984.000,00	35.299.000,00
	1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	23.315.000,00	11.984.000,00	35.299.000,00

6.3.2.7 Alat Laboratorium

31 Desember 2023
Rp. 15.860.000,00

31 Desember 2022
Rp. 15.860.000,00

Nilai **Alat Laboratorium** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 15.860.000,-** Tidak ada kenaikan dan Penurunan, dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **15.860.000,00,-**.

Tabel 6.25 Alat Laboratorium
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.02.08	Alat Laboratorium	15.860.000,00		15.860.000,00
	1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	15.860.000,00		15.860.000,00
	1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	15.860.000,00		15.860.000,00

6.3.2.7 Komputer

31 Desember 2023
Rp. 2.971.913.716,08,00

31 Desember 2022
Rp. 2.851.913.480,08,00

Nilai **Komputer** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 2.971.913.716,08,-** Terdapat kenaikan sebesar **Rp. 120.000.236,-** atau **4,04 %**, dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **2.851.913.480,08,00,-**.

Tabel 6.26 Komputer
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.02.10	Komputer	2.851.913.480,08	120.000.236,00	2.971.913.716,08
	1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.113.260.403,99	116.000.000,00	2.229.260.403,99
	1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.113.260.403,99	116.000.000,00	2.229.260.403,99
	1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	738.653.076,09	4.000.236,00	742.653.312,09
	1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	526.923.076,09	13.025.236,00	539.948.312,09
	1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	211.730.000,00	9.025.000,00	202.705.000,00

Terdapat belanja Barang perolehan dari Belanja Barang dan Jasa 1 unit Printer pada peralatan personal komputer pembelian Tahun 2023. Sehingga di lakukan reklasifikasi ke Nilai aset diatas Nilai Tahun 2023.

6.3.2.8 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

31 Desember 2023
Rp. 77.000.000,00

31 Desember 2022
Rp. 0,00

Nilai **Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 77.000.000,-** Terdapat kenaikan sebesar **Rp. 77.000.000,-** atau **100 %**, dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,00,-**.

Tabel 6.27 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
	1.3.02.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
	1.3.02.13.03.0002	Alat Pengolahan Air	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00

Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian pada Dinas Sosial dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2023 merupakan Depot Air minum isi ulang dan di butuhkan bagi klien di dalam Panti pada UPTD PSTW Budi Luhur Jambi dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi.

6.3.2.9 Peralatan Olahraga

31 Desember 2023
Rp. 25.010.000,00

31 Desember 2022
Rp. 25.010.000 ,00

Nilai **Peralatan Olahraga** pada Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 25.010.000,-** Tidak terdapat kenaikan dan Penurunan atau pun persentase, dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 25.010.000 ,00,-**.

Tabel 6.28 Peralatan Olahraga
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.02.19	Peralatan Olahraga	25.010.000,00		25.010.000,00
	1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	25.010.000,00		25.010.000,00
	1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	25.010.000,00		25.010.000,00

6.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp. 19.304.852.341,84

31 Desember 2022
Rp. 19.514.859.155,84

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.304.852.341,84 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.514.859.155,84 Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022 Rp 19.514.859.155,84

Mutasi Tambah
Mutasi Kurang
Jumlah Nilai perolehan 2023

Rp 246.159.646
Rp 615.657.000
Rp 19.304.852.341,84

**Tabel 6.29 Peralatan Olahraga
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.03	Gedung dan Bangunan	19.514.859.155,84		19.304.852.341,84
	1.3.03.01	Bangunan Gedung	19.514.859.155,84		19.145.361.801,84
	1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.706.699.450,00		13.268.928.356,00
	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.549.020.500,00	40.838.750,00	5.589.859.250,00
	1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	416.786.800,00		416.786.800,00
	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	341.646.000,00		341.646.000,00
	1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	368.164.214,00		368.164.214,00
	1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	648.375.000,00	43.126.770,00	691.501.770,00
	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.406.952.036,00	-	1.406.952.036,00
	1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.145.671.000,00	43.648.386,00	1.189.319.386,00
	1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	219.609.000,00		219.609.000,00
	1.3.03	Bangunan Gedung Garasi/Pool	19.514.859.155,84		55.185.750,00
	1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	149.800.000,00		149.800.000,00
	1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	442.348.150,00		442.348.150,00
	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	49.900.000,00		49.900.000,00
	1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	0,00	50.272.000,00	50.272.000,00
	1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.913.241.000,00		2.297.584.000,00

	1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.808.159.705,84		5.876.433.445,84
	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	259.925.500,00		259.925.500,00
	1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	347.848.072,00		347.848.072,00
	1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	194.206.800,00		194.206.800,00
	1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.006.179.333,84	68.273.740,00	5.074.453.073,84
	1.3.03.03	Bangunan Menara			159.490.540,00
	1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan			159.490.540,00
	1.3.03.03.01.0005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya			159.490.540,00

Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dinas Jl. A, Thalib No, 45 Telanaipura Jambi
2. Pekerjaan Rehab Gedung pertemuan dan Gedung Olahraga pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Jl, Pattimura Jambi.
3. Pekerjaan Mess/Asrama/Tempat Peristirahatan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi di Talang Bakung Jambi
4. Pekerjaan menara Air pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi di Talang Bakung Jambi

6.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 2.647.150.913,00	Rp. 1.958.006.913,00

Tidak ada Penambahan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **2.647.150.913**, dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **1.958.006.913,00** Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp	1.958.006.913,00
------------------	----	-------------------------

Mutasi Tambah	Rp	615,657,000,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Nilai perolehan 2023	Rp	2.647.150.913,00

**Tabel 6.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 2023**

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.958.006.913,00		2.647.150.913,00
	1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	437.180.000,00		1.052.837.000,00
	1.3.04.01.01	Jalan	299.180.000,00		914.837.000,00
	1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	299.180.000,00	615.657.000,00	914.837.000,00
	1.3.04.01.02	Jembatan	138.000.000,00		138.000.000,00
	1.3.04.01.02.0010	Jembatan Penyeberangan	138.000.000,00		138.000.000,00
	1.3.04.02	Bangunan Air	1.357.259.000,00		1.357.259.000,00
	1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	386.430.000,00		386.430.000,00
	1.3.04.02.02.0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut	386.430.000,00		386.430.000,00
	1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	970.829.000,00		970.829.000,00
	1.3.04.04	Jaringan	163.567.913,00		237.054.913,00
	1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	163.567.913,00	40.838.750,00	237.054.913,00
	1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	163.567.913,00	73.487.000,00	237.054.913,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

1. Terdapat reklas dari Gedung dan Bangunan Pada Jalan Khusus
2. Terdapat belanja Barang dan Jasa pada alat listrik dan nilai diatas kapitalisasi sehingga dilakukan reklasifikasi ke aset Jaringan Lainnya pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Tahun 2023

6.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
Rp. 9.565.087.948,00

31 Desember 2022
Rp. 9.575.682.948,00

Tidak ada Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **9.565.087.948,00,-** dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **9.575.682.948,00,-**
Tidak ada penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2022.

Saldo Tahun 2022	Rp	9.575.682.948,00
Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang	Rp	10.595.000,00
Jumlah Nilai perolehan 2023	Rp	9.565.087.948,00

Tabel 6.31 Aset Tetap Lainnya
Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Anggaran 2023
	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.575.682.948,00		9.565.087.948,00
	1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	5.242.000,00		4.622.000,00
	1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.242.000,00		4.622.000,00
	1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	5.242.000,00	620.000,00	4.622.000,00
	1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9.975.000,00		0,00
	1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	9.975.000,00		0,00
	1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	9.975.000,00		0,00
	1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	9.560.465.948,00		9.560.465.948,00
	1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	9.560.465.948,00		9.560.465.948,00
	1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	9.560.465.948,00		9.560.465.948,00

Aset Tetap Lainnya Pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi :

- 1 Terdapat reklasifikasi aset pada Aset tetap lainnya Buku Ilmu Sosial sebesar Rp.620.000,- terdiri dari nilai sebesar Rp.120.000 reklas ke Alat Rumah Tangga Home Use dan Rp.500.000,- Reklas ke Meubelair
- 2 Terdapat reklasifikasi aset pada Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp, 9.975.000,- berupa CCTV Reklas ke Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Alat Kantor Lainnya

6.3.6 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
(Rp. 16.839.696.664,83) (Rp. 15.502.183.605,61)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 16.839.696.664,83) dibandingkan dengan tahun 2022 (Rp. 15.502.183.605,61). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023.

Tabel 6.32 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Peralatan dan Mesin	(10.027.092.601,60)	(9.101.129.258,29)
2.	Gedung dan Bangunan	(6.471.331.633,64)	(6.185.697.907,08)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(341.272.429,59)	(215.356.440,24)
4.	Aset Tetap Lainnya		(0,00)
	JUMLAH	-16.839.696.664,83	-15.502.183.605,61

6.4 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Rp. 10.027.092.601,60) (Rp.9.101.129.258,31)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 10.027.092.601,60) dibandingkan dengan tahun 2022 (Rp.9.101.129.258,31). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023.

Tabel 6.33 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per	Per
----	---------------	--------	-----	-----

.			31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(544.500,00)	0,00
2	1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(544.500,00)	0,00
3	1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.057.063.829,14)	(3.071.200.138,69)
4	1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.512.413.422,62)	(2.425.345.565,50)
5	1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(304.349.347,00)	(304.349.347,00)
6	1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(119.896.297,62)	(158.243.321,43)
7	1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(6.004.761,90)	(461.904,76)
8	1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(114.000.000,00)	(182.400.000,00)
9	1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(400.000,00)	(400.000,00)
10	1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(115.667.466,67)	(101.173.866,67)
11	1.3.07.01.03.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	(107.662.866,67)	(95.394.066,67)
12	1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(8.004.600,00)	(5.779.800,00)
13	1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(4.294.430.936,04)	(3.887.711.034,59)
14	1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(4.640.000,00)	(4.640.000,00)
15	1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(1.912.300,00)	(1.276.700,00)

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(641.706.201,63)	(573.391.082,43)
2	1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(313.699.577,08)	(290.271.368,75)
3	1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1.217.674.843,66)	(1.169.249.143,67)
4	1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(524.992,00)	(524.992,00)

5	1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(106.254.506,40)	(84.533.206,13)
6	1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(425.743.839,54)	(365.404.868,68)
7	1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(141.699.433,33)	(134.297.633,33)
8	1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.098.363.821,27)	(968.822.537,67)
9	1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(3.640.100,00)	(3.640.100,00)
10	1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(193.780.684,52)	(172.222.432,45)
11	1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(10.906.250,00)	(5.671.250,00)
12	1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(105.584.591,95)	(90.285.143,48)
13	1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(1.253.061,33)	(96.389,33)
14	1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	(27.046.733,33)	(23.384.186,67)
15	1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(334.623.168,66)	(164.804.645,66)
16	1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(19.779.800,00)	(15.729.800,00)
17	1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(279.107.333,33)	(123.380.258,33)
18	1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(35.736.035,33)	(25.694.587,33)
19	1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(14.628.400,00)	(10.072.666,67)
20	1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(14.628.400,00)	(10.072.666,67)

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(15.860.000,00)	(15.860.000,00)
2	1.3.07.01.08.0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(15.860.000,00)	(15.860.000,00)
3	1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.170.529.301,09)	(1.829.235.239,36)
4	1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal	(1.599.074.933,42)	(1.356.773.195,69)

		Computer		
5	1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(369.699.367,67)	(295.516.210,34)
6	1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(201.755.000,00)	(176.945.833,33)
7	1.3.07.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(1.283.333,33)	0,00
8	1.3.07.01.13.0007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	(1.283.333,33)	0,00
9	1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(22.461.666,67)	(21.071.666,67)
10	1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(22.461.666,67)	(21.071.666,67)

6.4.1 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
(Rp. 6.471.331.633,64)

31 Desember 2022
(Rp.6.185.697.907,08)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp. 6.471.331.633,64)** dibandingkan dengan tahun 2022 **(Rp.6.185.697.907,08)**.

Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023.

Tabel 6.34 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.471.065.816,07)	(6.185.697.907,08)
2	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.553.148.309,98)	(2.456.385.538,53)
3	1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(64.833.952,25)	(62.442.787,47)

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(56.549.532,64)	(49.277.214,66)
2	1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(202.392.784,23)	(194.612.065,11)
3	1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(142.830.560,42)	(128.658.603,47)
4	1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung	(511.234.446,21)	(483.262.449,97)

		Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
5	1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(408.581.211,24)	(385.490.091,71)
6	1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(43.527.402,94)	(39.275.942,28)
7	1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(12.990.869,69)	(12.171.349,39)
8	1.3.07.02.01.0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(12.233.666,67)	(9.237.666,67)
9	1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(62.363.553,02)	(53.421.692,58)
10	1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(1.081.166,67)	(83.166,67)
11	1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(83.786,67)	0,00
12	1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(321.269.183,59)	(351.438.876,20)
13	1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(39.847.900,60)	(28.749.197,10)
14	1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(165.300.921,60)	(158.343.960,16)
15	1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(54.989.446,51)	(48.586.360,35)
16	1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(1.817.807.121,14)	(1.724.260.944,76)
17	1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(265.817,57)	0,00
18	1.3.07.02.03.0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	(265.817,57)	0,00

6.4.2 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2023
(Rp. 341.272.429,59)

31 Desember 2022
(Rp. (215.356.440,24))

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023
sebesar **(Rp. 341.272.429,59)** dibandingkan dengan tahun 2022 **(215.356.440,24)**.

Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023.

Tabel 6.35 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(179.217.946,94)	(84.689.433,33)
2	1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(110.217.946,94)	(18.449.433,33)
3	1.3.07.03.01.0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(69.000.000,00)	(66.240.000,00)
4	1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(110.842.818,33)	(83.697.638,33)
5	1.3.07.03.02.0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(31.558.450,00)	(23.829.850,00)
6	1.3.07.03.02.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(79.284.368,33)	(59.867.788,33)
7	1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(51.211.664,32)	(46.969.368,58)
8	1.3.07.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(51.211.664,32)	(46.969.368,58)

6.5 Aset Lainnya

31 Desember 2023
Rp. 3.190.311,67

31 Desember 2022
Rp. 6.670.651,67

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **3.190.311,67,-** dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **6.670.651,67,-**. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp	6.670.651,67
Mutasi Tambah	Rp	156.700,00
Mutasi Kurang	Rp	3.480.340,00
Akumulasi Amortisasi	Rp	(137.700.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -		
Aset Lain-lain	Rp	(1.951.821.758,20)
Jumlah 2023	Rp	3.190.311,67

Tabel 6.36 Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.5.03	Aset Tidak Berwujud	36.401.700,00	17.401.700,00
2.	1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	36.401.700,00	17.401.700,00
3.	1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	36.401.700,00	17.401.700,00

4.	1.5.03.01.01.0005	Software	36.401.700,00	17.401.700,00
5.	1.5.04	Aset Lain-lain	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
6.	1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
7.	1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
8.	1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
9.	1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
10.	1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
11.	1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
12.	1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
13.	1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.951.821.758,20)	(1.814.121.758,20)
14.	1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.951.821.758,20)	(1.814.121.758,20)
15.	1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(1.814.121.758,20)	(1.814.121.758,20)
16.	1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(1.814.121.758,20)	(1.814.121.758,20)
17.	1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(137.700.000,00)	0,00
18.	1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(137.700.000,00)	0,00
		Jumlah	3.190.311,67	6.670.651,67

6.5.1 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023
Rp. 36.401.700,00

31 Desember 2022
Rp. 17.401.700,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **36.401.700,-**dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **17.401.700,00**

Saldo Tahun 2022

Rp

17.401.700

Mutasi Tambah	Rp	19.000.000
Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah Saldo 2023	Rp	36.401.700

Tabel 6.37 Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Kode rek	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1. 1.5.03	Aset Tidak Berwujud	36.401.700,00	17.401.700,00
2. 1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	36.401.700,00	17.401.700,00
3. 1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	36.401.700,00	17.401.700,00
4. 1.5.03.01.01.0005	Software	36.401.700,00	17.401.700,00
Jumlah		36.401.700,00	17.401.700,00

Aset Tidak Berwujud TA 2023 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan reklas dari Alat Komputer Jaringan sebesar Rp.19.000.000,-

6.5.2 Aset Lain-lain

31 Desember 2023
Rp. 1.951.821.758,20

31 Desember 2022
Rp. 1.814.121.758.20

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **1.951.821.758,20** dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **1.814.121.758.20**.

Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp	1.814.121.758.20
Mutasi Tambah	Rp	137.700.000
Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah saldo 2023	Rp	1.951.821.758,20

Tabel 6.38 Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Kode rek	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1. 1.5.04	Aset Lain-lain	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
2. 1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
3. 1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20
4. 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20

	Jumlah	1.951.821.758,20	1.814.121.758,20

Aset lain lain Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terdapat penambahan nilai sebesar Rp.137.700.000,- yang merupakan reklas dari Peralatan dan Mesin Alat angkutan kendaraan roda Dua dan Alat Angkutan Kendaraan Khusus yang telah usang/Rusak Berat.

6.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023
(Rp. 33.211.388,33)

31 Desember 2021
(Rp. 10.731.048,33)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 33.211.388,33) dan tahun 2022 (Rp. 10.731.048,33).

Tabel 6.39 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Kode rek		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
2.	1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
3.	1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
4.	1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(33.211.388,33)	(10.731.048,33)
Jumlah			(33.211.388,33)	(10.731.048,33)

6.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2023
(Rp. 1.951.821.758,20)

31 Desember 2022
(Rp. 1.814.121.758,20)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per

31 Desember 2023 sebesar **(Rp. 1.951.821.758,20)**, dan tahun 2022 sebesar **(Rp. 1.814.121.758,20)**

Tabel 6.40 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Kode rek		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.951.821.758,20)	(1.814.121.758,20)
2.	1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.951.821.758,20)	(1.814.121.758,20)
3.	1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(1.814.121.758,20)	(1.814.121.758,20)
4.	1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(1.814.121.758,20)	(1.814.121.758,20)
Jumlah			(1.814.121.758,20)	(1.814.121.758,20)

6.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

31 Desember 2023
(Rp. 137.700.000,00)

31 Desember 2022
(Rp.0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp. 137.700.000,00)**, dan tahun 2022 sebesar **(Rp.0)**

Tabel 6.41 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Kode rek		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(137.700.000,00)	0,00
2.	1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(137.700.000,00)	0,00
Jumlah			(137.700.000,00)	0,00

6.6 Kewajiban

31 Desember 2023
Rp. 93.481.723,00

31 Desember 2022
Rp. 33.836.260,00

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi.

Sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 42.470.849,00** dan kewajiban Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **33.836.260,00**

6.6.1. Kewajiban Jangka Pendek **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp. 29.591.835,00 **Rp. 23.422.336,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 29.591.835,00** per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **23.422.336,00**. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6.42 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	2.1.06	Utang Belanja	42.470.849,00	33.836.260,00
2.	2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	42.470.849,00	33.836.260,00
3.	2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	42.470.849,00	33.836.260,00
4.	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	47.016,00	47.016,00
5.	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	10.426.850,00	5.496.500,00
6.	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	25.207.517,00	22.201.676,00
7.	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.789.466,00	6.091.068,00
Jumlah			42.470.849,00	33.836.260,00

6.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 **Rp. 28.505.834.193,78** dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 28.249.878.011,98** dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Tahun 2022	Rp	28.249.878.011,78
Mutasi Tambah	Rp	255.956.181,80
Mutasi Kurang	Rp	0
Saldo Tahun 2023	Rp	28.505.834.193,78

Tabel 6.43 Ekuitas

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	3.1.01	Ekuitas	(9.482.061.383,22)	28.249.878.011,98
2.	3.1.01.01	Ekuitas	28.250.910.122,44	53.847.730.024,60
3.	3.1.01.01.01	Ekuitas	28.250.910.122,44	53.847.730.024,60
4.	3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	28.250.910.122,44	53.847.730.024,60
5.	3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(37.732.971.505,66)	(25.597.852.012,62)
6.	3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(37.732.971.505,66)	(25.597.852.012,62)
7.	3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(37.732.971.505,66)	(25.597.852.012,62)
8.	3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	37.987.895.577,00	0,00
9.	3.1.03.01	RK PPKD	37.987.895.577,00	0,00
10.	3.1.03.01.01	RK PPKD	37.987.895.577,00	0,00
11.	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	37.987.895.577,00	0,00
		Jumlah	28.505.834.193,78	28.249.878.011,98

6.7.1 Ekuitas

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp. 28.250.910.122,44 **Rp. 53.847.730.024,60**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 **Rp. 28.250.910.122,44** dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 53.847.730.024,60** dengan rincian sebagai berikut.

6.7.2 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp. (37.732.971.505,66) **Rp. (25.597.852.012,62)**

Surplus/Defisit-LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **(37.732.971.505,66),-** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. (25.597.852.012,62),-** Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2023.

6.7.3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	<u>31 Desember 2023</u> Rp. 37.987.895.577,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp. 0
---	--	--

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **37.987.895.577,00,-** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp.0,-** Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2023.

LAPORAN PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

7. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

Uraian		2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Kegiatan Operasional				
7	PENDAPATAN	221.140.000,00	10.746.726.248,00	(10.525.586.248,00)	(97,94)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	183.000.000,00	10.726.206.248,00	(10.543.206.248,00)	(98,29)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	183.000.000,00	10.726.206.248,00	(10.543.206.248,00)	(98,29)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
8	BEBAN	38.081.694.422,33	36.344.578.260,62	1.737.116.161,71	4,78
8.1	BEBAN OPERASI	36.455.385.996,00	35.114.376.654,00	1.341.009.342,00	3,82
8.1.01	Beban Pegawai	16.895.356.573,00	17.367.470.575,00	(472.114.002,00)	(2,72)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	18.414.529.423,00	17.494.572.079,00	919.957.344,00	5,26
8.1.05	Beban Hibah	1.145.500.000,00	0,00	1.145.500.000,00	100,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	252.334.000,00	(252.334.000,00)	(100,00)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.626.308.426,33	1.230.201.606,62	396.106.819,71	32,20
	JUMLAH BEBAN	38.081.694.422,33	36.344.578.260,62	1.737.116.161,71	4,78
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(37.860.554.422,33)	(25.597.852.012,62)	(12.262.702.409,71)	47,91
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.860.554.422,33)	(25.597.852.012,62)	(12.262.702.409,71)	47,91

7.1 PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN - LO adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

PENDAPATAN - LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **221.140.000,00,-** Turun sebesar Rp.(10.525.586.248,00) atau sebesar (97,94)% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 10.746.726.248,00,-** Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.Pada TA 2023.

Tabel 7.1 PENDAPATAN - LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	38.140.000,00	20.520.000,00
2.	7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	183.000.000,00	10.726.206.248,00
		JUMLAH PENDAPATAN	221.140.000,00	10.746.726.248,00

7.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

31 Desember 2023
Rp. 38.140.000,00

31 Desember 2022
Rp. 20.520.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **38.140.000,00,-** Naik sebesar Rp.17.620.000,00 atau sebesar 85,87% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 20.520.000,00,-** Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dari Pendapatan Sewa Gedung Tempat Pertemuan dan Gedung Tempat Olahraga Pendapatan yang Sah.Pada TA 2023.

Tabel 7.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	7.1.02	Retribusi Daerah-LO	38.140.000,00	20.520.000,00

2.	7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	38.140.000,00	20.520.000,00
3	7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	27.900.000,00	15.400.000,00
4	7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	27.900.000,00	15.400.000,00
5	7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	10.240.000,00	5.120.000,00
6	7.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	10.240.000,00	5.120.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO			38.140.000,00	20.520.000,00

7.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

31 Desember 2023
Rp. 38.140.000,00

31 Desember 2022
Rp. 20.520.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **38.140.000,00,-** Naik sebesar Rp.17.620.000,00 atau sebesar 85,87% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 20.520.000,00,-** Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dari Pendapatan Sewa Gedung Tempat Pertemuan dan Gedung Tempat Olahraga Pendapatan yang Sah.Pada TA 2023.

7.4 BEBAN-LO

BEBAN-LO Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan.

BEBAN-LO.Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **37.954.111.505,66,-** Naik sebesar Rp. 1.609.533.245,04 atau sebesar 4.43% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 36.344.578.260,62,-**

Tabel 8.1 BEBAN - LO

(dalam rupiah)

Uraian		2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Kegiatan Operasional					
7	PENDAPATAN	221.140.000,00	10.746.726.248,00	(10.525.586.248,00)	(97,94)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	183.000.000,00	10.726.206.248,00	(10.543.206.248,00)	(98,29)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	183.000.000,00	10.726.206.248,00	(10.543.206.248,00)	(98,29)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
8	BEBAN	38.081.694.422,33	36.344.578.260,62	1.737.116.161,71	4,78
8.1	BEBAN OPERASI	36.455.385.996,00	35.114.376.654,00	1.341.009.342,00	3,82
8.1.01	Beban Pegawai	16.895.356.573,00	17.367.470.575,00	(472.114.002,00)	(2,72)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	18.414.529.423,00	17.494.572.079,00	919.957.344,00	5,26
8.1.05	Beban Hibah	1.145.500.000,00	0,00	1.145.500.000,00	100,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	252.334.000,00	(252.334.000,00)	(100,00)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.626.308.426,33	1.230.201.606,62	396.106.819,71	32,20
	JUMLAH BEBAN	38.081.694.422,33	36.344.578.260,62	1.737.116.161,71	4,78
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(37.860.554.422,33)	(25.597.852.012,62)	(12.262.702.409,71)	47,91
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.860.554.422,33)	(25.597.852.012,62)	(12.262.702.409,71)	47,91

7.5 BEBAN OPERASI - LO

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp. 36.455.385.996,00 **Rp. 35.114.376.654,00**

BEBAN OPERASI - LO adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

BEBAN OPERASI – LO .Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.

36.455.385.996,00,- Naik sebesar Rp. 1.341.009.342,00,- atau sebesar 3.82% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 35.114.376.654,00,-**

Tabel 8.2 BEBAN OPERASI - LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	8.1.01	Beban Pegawai	16.895.356.573,00	17.367.470.575,00
2.	8.1.02	Beban Barang dan Jasa	18.414.529.423,00	17.494.572.079,00
3	8.1.05	Beban Hibah	1.145.500.000,00	0,00
4	8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	252.334.000,00
		JUMLAH BEBAN OPERASI	36.455.385.996,00	35.114.376.654,00

7.5.1 Beban Pegawai - LO

31 Desember 2023
Rp. 16.895.356.573,00

31 Desember 2022
Rp. 17.367.470.575,00

Beban Pegawai - LO merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai - LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **16.895.356.573,00,-** Turun sebesar Rp. **(472.114.002,00)-** atau sebesar (2,72)% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 17.367.470.575,00,-**

Tabel 8.3 Beban Pegawai - LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.953.008.939,00	9.133.236.999,00
2.	8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	6.731.979.200,00	6.849.374.200,00
3	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	6.731.979.200,00	6.849.374.200,00
4	8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	575.692.798,00	598.093.666,00
5	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	575.692.798,00	598.093.666,00
6	8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	355.900.000,00	357.690.000,00
7	8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	355.900.000,00	357.690.000,00
8	8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	177.145.000,00	193.940.000,00
9	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	177.145.000,00	193.940.000,00

10	8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	179.680.000,00	183.625.000,00
11	8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	179.680.000,00	183.625.000,00
12	8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	336.173.640,00	351.092.160,00
13	8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	336.173.640,00	351.092.160,00
14	8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.742.216,00	11.936.605,00
15	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.742.216,00	11.936.605,00
16	8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	86.707,00	87.634,00
17	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	86.707,00	87.634,00
18	8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	527.413.847,00	531.402.807,00
19	8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	527.413.847,00	531.402.807,00
20	8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.798.820,00	13.998.649,00
21	8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.798.820,00	13.998.649,00
22	8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	41.396.711,00	41.996.278,00
23	8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	41.396.711,00	41.996.278,00
24	8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.492.817.634,00	7.294.993.576,00
25	8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.447.465.646,00	3.847.070.737,00
26	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.447.465.646,00	3.847.070.737,00
27	8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	22.646.249,00	22.668.920,00
28	8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	22.646.249,00	22.668.920,00
29	8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.022.705.739,00	3.425.253.919,00
30	8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.022.705.739,00	3.425.253.919,00
31	8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	449.530.000,00	939.240.000,00
32	8.1.01.03.07	Beban Honorarium	449.530.000,00	939.240.000,00
33	8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	446.130.000,00	931.080.000,00
34	8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	8.160.000,00
		Jumlah Beban Pegawai	16.895.356.573,00	17.367.470.575,00

7.5.2 Beban Barang dan Jasa- LO

31 Desember 2023
Rp. 18.414.529.423,00

31 Desember 2022
Rp. 17.494.572.079,00

Beban Barang dan Jasa- LO merupakan penurunan manfaatekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Barang dan Jasa- LO .Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **18.414.529.423,00,-** Naik sebesar Rp. **919.957.344,00,-** atau sebesar 5,26% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 17.494.572.079,00,-**

Tabel 8.4 Beban Barang dan Jasa- LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	8.1.02.01	Beban Barang	6.540.400.136,00	5.539.972.005,00
2.	8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	6.539.950.136,00	5.539.972.005,00
3	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.052.085,00	1.360.000,00
4	8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	9.097.197,00	0,00
5	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	149.010.250,00	133.005.408,00
6	8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	12.220.000,00	9.472.913,00
7	8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.412.000,00	2.861.400,00
8	8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	8.550.000,00	81.300.000,00
9	8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.925.000,00	500.000,00
10	8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	720.919.582,00	407.695.799,00
11	8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	1.571.700,00
12	8.1.02.01.01.0022	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	25.080.000,00	190.852.540,00
13	8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	538.350,00	1.890.000,00
14	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.893.290,00	211.544.601,00
15	8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.780.000,00	36.184.060,00
16	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.292.775,00	215.219.750,00
17	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	7.200.000,00
18	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	79.048.830,00	77.515.752,00
19	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	300.270.569,00	12.724.563,00

20	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	96.357.896,00	102.598.240,00
21	8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	317.095.810,00	16.425.000,00
22	8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	189.105.499,00	16.560.000,00
23	8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.627.007,00	25.392.000,00
24	8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	563.535.985,00	358.816.804,00
25	8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	3.291.823,00	45.181.900,00
26	8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.922.608,00	1.950.167,00
27	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	536.330.240,00	548.495.578,00
28	8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	(60.925.607,00)	0,00
29	8.1.02.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	93.234.900,00
30	8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	560.000,00
31	8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	82.534.816,00	0,00
32	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	173.253.550,00	144.942.100,00
33	8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	48.604.450,00	33.450.200,00
34	8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	130.448.500,00	417.000,00
35	8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.414.904.901,00	2.178.999.445,00
36	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	182.530.000,00	114.350.000,00
37	8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	33.140.000,00
38	8.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga	0,00	2.250.000,00
39	8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	5.633.250,00	121.325.680,00
40	8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	9.310.680,00	84.576.000,00
41	8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	22.798.800,00	226.408.505,00
42	8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	450.000,00	0,00
43	8.1.02.01.02.0013	Beban Pipa-Pipa Lainnya	450.000,00	0,00
44	8.1.02.02	Beban Jasa	5.724.989.429,00	5.450.714.446,00
45	8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	5.535.335.416,00	4.827.012.421,00
46	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	258.023.000,00	548.037.500,00
47	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	175.880.000,00	43.000.000,00
48	8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.145.350.000,00	1.191.900.000,00

49	8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	0,00	17.700.000,00
50	8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	59.400.000,00
51	8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	36.000.000,00	41.400.000,00
52	8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	448.800.000,00	460.800.000,00
53	8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	36.000.000,00	40.994.880,00
54	8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	70.500.000,00	0,00
55	8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	2.800.000,00
56	8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	510.000.000,00	486.000.000,00
57	8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	6.000.000,00
58	8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	345.000.000,00	40.500.000,00
59	8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	511.169.880,00	169.450.000,00
33	8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	180.750.000,00	503.160.000,00
34	8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	231.000.000,00	531.827.332,00
35	8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	54.000.000,00
36	8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	1.650.000,00
37	8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	0,00
38	8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	57.000.000,00
39	8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.800.000,00	110.290.000,00
40	8.1.02.02.01.0054	Beban Jasa Jalan/Tol	645.000,00	2.241.000,00
41	8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.000.000,00	30.950.000,00
42	8.1.02.02.01.0057	Beban Jasa Operator Kapal	1.288.000,00	0,00
43	8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	472.176,00	13.107.972,00
44	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	90.365.141,00	62.115.600,00
45	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	315.865.592,00	259.721.920,00
46	8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	43.150.000,00	2.250.000,00
47	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	87.107.747,00	67.067.018,00
48	8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	8.865.780,00	6.750.999,00
49	8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.803.100,00	16.898.200,00
50	8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.139.395,00	15.172.425,00
51	8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.139.395,00	15.172.425,00
52	8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	149.014.618,00	140.250.000,00
53	8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	83.614.618,00	0,00
54	8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	65.400.000,00	122.350.000,00
55	8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	9.000.000,00
56	8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	0,00	900.000,00
57	8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	8.000.000,00

58	8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	45.000.000,00
59	8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.500.000,00	45.000.000,00
33	8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	1.500.000,00
34	8.1.02.02.07.0037	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	1.500.000,00
35	8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	376.652.000,00
36	8.1.02.02.10.0004	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	376.652.000,00
37	8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	39.727.600,00
38	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	11.000.000,00	10.500.000,00
39	8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	0,00	1.500.000,00
40	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	0,00	27.727.600,00
41	8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	5.400.000,00
42	8.1.02.02.14.0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	5.400.000,00
43	8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	153.841.500,00	874.889.874,00
44	8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.441.500,00	781.339.874,00
45	8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	610.096.535,00
46	8.1.02.03.02.0083	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia	66.135.000,00	0,00
47	8.1.02.03.02.0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	1.688.000,00
48	8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	97.610.000,00
49	8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	9.905.699,00
50	8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	710.000,00
51	8.1.02.03.02.0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	58.539.640,00
52	8.1.02.03.02.0366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	1.306.500,00	0,00
53	8.1.02.03.02.0433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan	0,00	2.790.000,00

		Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	
54	8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 86.400.000,00	93.550.000,00
55	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 86.400.000,00	(16.250.000,00)
56	8.1.02.03.03.0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam 0,00	109.800.000,00
57	8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas 4.085.485.577,00	4.596.995.754,00
58	8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.923.485.577,00	4.596.995.754,00
59	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa 3.206.355.577,00	3.539.155.754,00
60	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00	20.550.000,00
61	8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 669.830.000,00	1.032.990.000,00
62	8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.600.000,00	4.300.000,00
63	8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 162.000.000,00	0,00
64	8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 162.000.000,00	0,00
65	8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.909.812.781,00	1.032.000.000,00
66	8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 941.000.000,00	1.030.000.000,00
67	8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00	44.000.000,00
68	8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi 6.000.000,00	0,00
69	8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 968.812.781,00	2.000.000,00
70	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 960.412.781,00	2.000.000,00
71	8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.400.000,00	0,00
72	8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 968.812.781,00	2.000.000,00
73	8.1.05	Beban Hibah 1.145.500.000,00	0,00
74	8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.018.500.000,00	0,00
75	8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 127.000.000,00	0,00
76	8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 127.000.000,00	0,00
77	8.1.06	Beban Bantuan Sosial 0,00	252.334.000,00

78	8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	152.334.000,00
79	8.1.06.02.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	152.334.000,00
80	8.1.06.02.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	152.334.000,00
81	8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	100.000.000,00
82	8.1.06.04.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	100.000.000,00
83	8.1.06.04.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	100.000.000,00
		JUMLAH BEBAN OPERASI	36.455.385.996,00	35.114.376.654,00

7.4.4 Beban Hibah- LO

31 Desember 2023
Rp. 1.145.500.000,00

31 Desember 2022
Rp. 0,00

Beban Barang dan Jasa- LO merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Barang dan Jasa- LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **1.145.500.000,00,-** Naik sebesar Rp. **1.145.500.000,00,-** atau sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **0,00,-**

Tabel 8.5 Beban Hibah- LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	8.1.05	Beban Hibah	1.145.500.000,00	0,00
2	8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan	1.145.500.000,00	0,00

		Hukum Indonesia	
3	8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.018.500.000,00	0,00
4	8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.018.500.000,00	0,00
5	8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 127.000.000,00	0,00
6	8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 127.000.000,00	0,00
		Jumlah Beban Hibah 1.145.500.000,00	0,00

7.4.5 Beban Bantuan Sosial- LO

31 Desember 2023

Rp. 0,00

31 Desember 2022

Rp. 252.334.000,00,00

Beban Bantuan Sosial- LO merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Beban Bantuan Sosial- LO .Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. **0,00,-** Turun sebesar Rp. **0,00,-** atau sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.**252.334.000,00,-**

Tabel 8.6 Beban Bantuan Sosial- LO

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	252.334.000,00
2	8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	152.334.000,00
3	8.1.06.02.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	152.334.000,00
4	8.1.06.02.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	152.334.000,00
5	8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	100.000.000,00
6	8.1.06.04.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang	0,00	100.000.000,00

		Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
7	8.1.06.04.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00
		JUMLAH Beban Bantuan Sosial	0,00
			100.000.000,00
			252.334.000,00

7.4.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp. 1.498.725.509,66,00 **Rp. 1.230.201.606,62,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu

Beban Penyusutan dan Amortisasi.Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.498.725.509,66,00,- Naik sebesar Rp. 268.523.903,04,00,- atau sebesar 21,83% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.230.201.606,62,00,-

Tabel 8.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

		Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	925.962.091,14	891.100.665,90
2	8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	544.500,00	0,00
3	8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	544.500,00	0,00
4	8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	(14.136.309,57)	145.396.904,76
5	8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	87.067.857,10	0,00
6	8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(38.347.023,81)	0,00
7	8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.542.857,14	0,00
8	8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(68.400.000,00)	0,00
9	8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan	0,00	145.396.904,76

		Darat Bermotor Lainnya	
10	8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.493.600,00 15.463.600,00
11	8.1.08.01.03.0010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.268.800,00 7.716.800,00
12	8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	2.224.800,00 0,00
13	8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00 7.746.800,00
14	8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	406.476.817,18 713.942.869,64
15	8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	635.600,00 0,00
17	8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	68.315.119,20 0,00
18	8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.428.208,33 713.651.202,97
19	8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	48.425.699,99 0,00
20	8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	21.721.300,27 0,00
21	8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	7.401.800,00 0,00
22	8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	129.564.866,94 291.666,67
23	8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	21.558.252,07 0,00
24	8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	5.235.000,00 0,00
25	8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	15.299.448,47 0,00
26	8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	1.156.672,00 0,00
27	8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	3.662.546,66 0,00
28	8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	169.818.523,00 11.227.854,00
29	8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.050.000,00 0,00
30	8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	155.727.075,00 0,00
31	8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00 11.227.854,00
32	8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	10.041.448,00 0,00
33	8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.555.733,33 3.056.000,00
34	8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.555.733,33 0,00

35	8.1.08.01.07.0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	3.056.000,00
36	8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	341.535.893,87	0,00
37	8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	242.301.737,73	0,00
38	8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	74.424.989,47	0,00
39	8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	24.809.166,67	0,00
40	8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.283.333,33	0,00
41	8.1.08.01.13.0007	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	1.283.333,33	0,00
42	8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	623.437,50
43	8.1.08.01.15.0009	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	623.437,50
44	8.1.08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.390.000,00	0,00
45	8.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	1.390.000,00
46	8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	286.667.089,16	295.642.622,90
47	8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	286.401.271,59	295.577.622,90
48	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	96.762.771,46	295.545.219,57
49	8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2.391.164,78	0,00
50	8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	7.272.317,98	0,00
51	8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.780.719,12	0,00
52	8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.755.068,56	0,00
53	8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.971.996,24	0,00
54	8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.576.359,01	0,00
55	8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.251.460,66	0,00
56	8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	819.520,30	0,00
57	8.1.08.02.01.0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	2.996.000,00	32.403,33
58	8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan	8.941.860,44	0,00

		Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
59	8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 998.000,00	0,00
60	8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 83.786,67	0,00
61	8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (30.169.692,61)	0,00
62	8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 11.098.703,50	0,00
63	8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II 6.956.961,44	0,00
64	8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III 6.403.086,16	0,00
65	8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara 265.817,57	0,00
66	8.1.08.02.03.0005	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya 265.817,57	0,00
67	8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00	65.000,00
68	8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar 0,00	65.000,00
69	8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 125.915.989,36	39.977.977,82
70	8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 94.528.513,62	8.743.600,00
71	8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus 91.768.513,62	0,00
72	8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya 0,00	8.743.600,00
73	8.1.08.03.01.0020	Beban Penyusutan Jembatan- Jembatan Penyeberangan 2.760.000,00	0,00
74	8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air 27.145.180,00	27.145.180,00
75	8.1.08.03.02.0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00	27.145.180,00
76	8.1.08.03.02.0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut 7.728.600,00	0,00
77	8.1.08.03.02.0041	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 19.416.580,00	0,00
78	8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan 4.242.295,74	4.089.197,82
79	8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya 4.242.295,74	2.044.598,91
80	8.1.08.03.04.0013	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 0,00	2.044.598,91
81	8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga 137.700.000,00	1.740.170,00
82	8.1.08.05.01	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 137.700.000,00	1.740.170,00
83	8.1.08.05.01.0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa 137.700.000,00	0,00

84	8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	22.480.340,00	1.740.170,00
85	8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	22.480.340,00	1.740.170,00
86	8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	22.480.340,00	1.740.170,00
		JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.498.725.509,66	1.230.201.606,62

7.5 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

31 Desember 2023 31 Desember 2022
 Rp. (37.732.971.505,66),00 Rp. 1.230.201.606,62,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. (37.732.971.505,66),00,- Naik sebesar Rp. (12.135.119.493,04),- atau sebesar 47,41% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. (25.597.852.012,62),-

7.6 Beban Non Operasional

31 Desember 2023 31 Desember 2022
 Rp. (37.732.971.505,66),00 Rp. 1.230.201.606,62,00

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban Non Operasional Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. (37.732.971.505,66),00,- Turun sebesar Rp. (12.135.119.493,04),- atau sebesar 47,41% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. (25.597.852.012,62),-

7.7. Beban Luar Biasa

31 Desember 2023 31 Desember 2022
 Rp. 0,00,- Rp. 0,00,-

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

PENJELASAN POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

8. EKUITAS AWAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 28.249.878.011,98,-	Rp. 14.696.309.867,09,-

EKUITAS AWAL Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 28.249.878.011,98,-** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 14.696.309.867,09,-**

8.1 SURPLUS / (DEFISIT) - LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
(Rp.37.732.971.505,66)	(Rp.25.597.852.012,62)

SURPLUS / (DEFISIT) - LO Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **(Rp.37.732.971.505,66)** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **(Rp.25.597.852.012,62)**

8.2 RK PPKD

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.37.987.895.577,00	Rp.0

RK PPKD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp.37.987.895.577,00** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp.0**

8.3. LAIN-LAIN

31 Desember 2023
Rp. 1.032.110,46,00

31 Desember 2022
Rp. 39.151.420.157,51

LAIN-LAIN Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp.37.987.895.577,00** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 39.151.420.157,51**

Tabel 8.6 LAIN-LAIN

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.500.000,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43.800.000,00	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	68.400.000,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.577.916,67	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(120.000,00)	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(266.667,61)	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(476.416,66)	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(6.100.000,00)	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	241.832,14	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.025.000,00	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	583.111,61	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(11.514.760,52)	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	11.965.011,50	0,00
14	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(19.000.000,00)	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN		128.615.027,13	39.151.420.157,51

8.4. EKUITAS AKHIR

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp. 28.505.834.193,78 Rp. 28.249.878.011,98

EKUITAS AKHIR Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 28.505.834.193,78,00,-** dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp. 28.249.878.011,98,-**

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada undang undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknis Pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan kemudian digabungkan oleh entitas menjadi Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan Kepada Gubernur Jambi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Operasioan-LO dan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat Pada Tabel dibawah ini

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000	38.140.000,00	95,35	20.520.000,00
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	38.140.000,00	95,35	20.520.000,00
3	Retribusi Daerah	40.000.000	38.140.000,00	95,35	20.520.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000	38.140.000,00	95,35	20.520.000,00

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	BELANJA DAERAH	39.729.041.670	38.026.035.577,00	95,71	40.320.261.262,84
2.	BELANJA OPERASI	38.570.582.848	36.910.165.782,00	95,70	38.519.669.214,84
3	Belanja Pegawai	17.370.400.847	16.895.356.573,00	97,27	17.367.470.575,00
4	Belanja Barang dan Jasa	20.054.682.001	18.869.309.209,00	94,09	20.899.864.639,84
5	Belanja Hibah	1.145.500.000	1.145.500.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	252.334.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	38.570.582.848	36.910.165.782,00	95,70	38.519.669.214,84
	BELANJA MODAL	1.158.458.822	1.115.869.795,00	96,32	1.800.592.048,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717.058.822	678.182.829,00	94,58	1.799.192.048,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.000.000	436.286.966,00	99,16	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.400.000	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(39.689.041.670)	(37.987.895.577,00)	95,71	(40.299.741.262,84)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(39.689.041.670)	(37.987.895.577,00)	95,71	(40.299.741.262,84)

**Tabel Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	1.3.01	Tanah		
2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.286.256.913,08	12.413.090.531,08
3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	19.304.852.341,84	19.514.859.155,84
4	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.647.150.913,00	1.958.006.913,00
5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.565.087.948,00	9.575.682.948,00
6	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(16.839.696.664,83)	(15.502.183.605,63)
		JUMLAH ASET TETAP	27.963.651.451,09	27.959.455.942,29

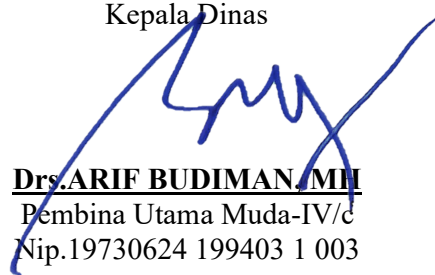
**Tabel Laporan Operasional – LO
TA 2023 dan TA 2022**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
1.	PENDAPATAN	221.140.000,00	10.746.726.248,00	(10.525.586.248,00)	(97,94)
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	38.140.000,00	20.520.000,00	17.620.000,00	85,87
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	183.000.000,00	10.726.206.248,00	(10.543.206.248,00)	(98,29)
	BEBAN	38.081.694.422,33	36.344.578.260,62	1.737.116.161,71	4,78
1	BEBAN OPERASI	36.455.385.996,00	35.114.376.654,00	1.341.009.342,00	3,82
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.626.308.426,33	1.230.201.606,62	396.106.819,71	32,20
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(37.860.554.422,33)	(25.597.852.012,62)	(12.262.702.409,71)	47,91

Demikian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

Jambi, Februari 2023
Kepala Dinas


Drs. ARIF BUDIMAN, MII
Pembina Utama Muda-IV/c
Nip.19730624 199403 1 003